

**PERANAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN
SWADAYA (P4S) DALAM PEMBERDAYAAN PETANI BINAAN DI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Tesis)

Oleh

**WELLY NURUL APRELIANI
NPM 2020021008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN
PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PERANAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN
SWADAYA (P4S) DALAM PEMBERDAYAAN PETANI BINAAN DI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh

WELLY NURUL APRELIANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan
Masyarakat
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN
PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

THE ROLE OF AGRICULTURE AND RURAL TRAINING CENTERS FOR SELF-SUPPORTING (P4S) IN EMPOWERMENT OF FARMERS ASSISTED IN LAMPUNG EAST DISTRICT

BY

WELLY NURUL APRELIANI

This study aims to determine the role of P4S in East Lampung Regency, determine the level of empowerment of assisted farmers, determine the direct and indirect influence of institutional governance system factors, cooperation and partnerships, Institutional capacity, Institutional management, characteristics of farmers, and reward systems on the level of empowerment of assisted farmers and determine the level of empowerment of farmers before and after being fostered by P4S in East Lampung District. This study used a survey method with a sample of 70 P4S assisted farmers who were allocated to 6 P4S in East Lampung Regency. Data were analyzed descriptively quantitatively, PLS (Partial Least Square) path analysis using SmartPLS and Paired Sample t-Test using SPSS. The results of the study show that the role of P4S is in the moderate category and the level of empowerment of assisted farmers is in the quite empowered category. The factors that directly influence the level of empowerment of assisted farmers are the institutional governance system, cooperation and partnerships, the role of P4S. Factors that have a significant effect on the level of empowerment of assisted farmers through the role of P4S are the institutional governance system, institutional capacity, and institutional management. The results of the Paired Sample t-Test show that there are differences in the level of empowerment of farmers before and after receiving guidance.

Keywords: Role, P4S, Empowerment of farmers

ABSTRAK

PERANAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S) DALAM PEMBERDAYAAN PETANI BINAAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

OLEH

WELLY NURUL APRELIANI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur, mengetahui tingkat keberdayaan petani binaan, mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung faktor sistem tata Kelola Lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas Lembaga, manajemen Lembaga, karakteristik petani, dan sistem penghargaan terhadap tingkat keberdayaan petani binaan dan mengetahui tingkat keberdayaan petani sebelum dibina dan setelah dibina oleh P4S di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel 70 petani binaan P4S yang teralokasi pada 6 P4S di Kabupaten Lampung Timur. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, analisis jalur PLS (*Partial Least Square*) menggunakan SmartPLS dan uji beda *Paired Sample t-Test* menggunakan SPSS. Hasil penelitian bahwa peranan P4S dalam kategori sedang dan tingkat keberdayaan petani binaan dalam kategori cukup berdaya, faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat keberdayaan petani binaan adalah sistem tata Kelola Lembaga, kerjasama dan kemitraan, peranan P4S. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat keberdayaan petani binaan melalui peranan P4S adalah sistem tata Kelola Lembaga, kapasitas Lembaga, dan manajemen lembaga. Hasil *Paired Sample t-Test* bahwa terdapat perbedaan tingkat keberdayaan petani sebelum dan setelah mendapat binaan.

Kata kunci: Peranan, P4S, Keberdayaan petani

Judul Tesis : PERANAN PUSAT PELATIHAN
PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA
(P4S) DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
BINAAN DI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR

Nama Mahasiswa : *Welly Nurul Apreliani*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2020021008

Program Studi : Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/
Pemberdayaan Masyarakat

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S.
NIP 195811111986031004



Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.
NIP 198101102008122001

2. Ketua Program Studi
Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat



Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.
NIP 195903211985031016

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S.



Sekretaris : Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.



Penguji Bukan Pembimbing : Muhammad Ibnu, S.P., MMA., M.Sc., Ph.D



Anggota : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 12 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Welly Nurul Apreliani
NPM : 2020021008
Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin
Program Studi : Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat

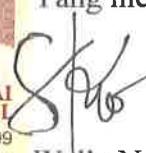
Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Peranan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dalam Pemberdayaan Petani Binaan di Kabupaten Lampung Timur” adalah benar karya ilmiah hasil penulisan saya dan tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain.

Adapun bagian tertentu dalam penulisan ini saya kutip dari karya penulis lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma dan etika penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari ternyata ada hal yang melanggar dari ketentuan akademik Universitas Lampung, maka saya bersedia bertanggungjawab dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Juli 2023

Yang membuat pernyataan


Welly Nurul Apreliani



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Dusun Pakuan Sari, Desa Putra Aji I, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur pada 17 April 1997. Penulis sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Samsul Huda (Alm) dan Ibu Partini (Alm).

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 2 Surya Mataram pada tahun 2009. Pada tahun 2012, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Baitul Muslim Way Jepara Lampung Timur. Pada tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur dan pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur tes tertulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Tahun 2019 penulis menyelesaikan Pendidikan S-1, selanjutnya tahun 2020 penulis mendapat kesempatan beasiswa bebas UKT dan lolos masuk di Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahiim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan segala nikmat-Nya, kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua orangtuaku, Syamsul Huda (Alm.) dan Partini (Alm.)

“Terimakasih atas semua kasih sayang dan pengorbanan selama ini serta doa yang selalu dipanjatkan untukku semasa hidup”

Kakakku, Angel Weny Widya Astuti

“Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, perhatian, pengertian, dan doanya yang tiada henti”

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “Peranan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dalam Pemberdayaan Petani Binaan di Kabupaten Lampung Timur ” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku direktur pascasarjana Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S., selaku ketua program studi Ilmu penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat sekaligus penguji anggota yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran selama penulis menyelesaikan tesis ini;
3. Bapak Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S., selaku pembimbing utama yang telah memberikan motivasi, bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian tesis ini;
4. Ibu Dr. Helvi Yanfika, S.P. M.E.P., selaku pembimbing kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Muhammad Ibnu, S.P., MMA., M.Sc., Ph.D., selaku penguji utama, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;

6. Ibu Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si., selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar dan staff administrasi di program studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Universitas Lampung dan seluruh pihak (pengurus, anggota, maupun petani binaan) P4S di Kabupaten Lampung Timur;
8. Kedua Orang Tua dan kakak tercinta, atas kasih sayang yang tercurah, semangat, motivasi, nasihat, dan doa yang senantiasa menyertai Penulis;
9. Sahabatku Fajar Hadi Puswito, terimakasih atas bantuan dan motivasi kepada penulis.

Penulis berharap semoga ALLAH membalas kebaikan yang telah diberikan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Bandar Lampung, Juli 2023

Welly Nurul Apreliani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.2. Rumusan Masalah	7
2.3. Tujuan Penelitian	8
2.4. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS.	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Konsep Peranan	9
2.1.2 Kelembagaan.....	10
2.1.3 Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)	11
2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat	18
2.1.5 Kelompok Tani	23
2.1.6 Variabel Penelitian.....	25
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	39
2.3 Kerangka Pemikiran.....	43
2.4 Hipotesis	48
III. METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran	49
3.1.1 Variabel (X)	49
3.1.2 Variabel (Y)	50
3.1.3 Variabel (Z).....	51
3.2 Waktu dan Tempat.....	68
3.3 Responden Penelitian.....	68
3.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data	69

3.5	Pengukuran Kesahihan dan Keterandalan Kuesioner Penelitian	70
3.6	Pengolahan dan Analisis Data	71
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	76
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur	76
4.2	Gambaran Umum P4S di Kabupaten Lampung Timur.....	79
4.3	Gambaran Umum Responden Penelitian	80
4.4	Teknik Analisis Data.....	82
4.4.2	Analisis Deskriptif Kuantitatif.....	82
4.4.2	Analisis Jalur PLS.....	103
4.4.3	Uji Beda	128
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	131
	DAFTAR PUSTAKA.....	134
	LAMPIRAN.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. PDRB di Provinsi Lampung menurut lapangan usaha (juta rupiah).....	2
2. Jumlah P4S di Indonesia per Provinsi	4
3. Jumlah P4S yang terdaftar di Provinsi Lampung.....	5
4. P4S di Kabupaten Lampung Timur	5
5. Ringkasan penelitian terdahulu.....	39
6. Pengukuran variabel X.....	53
7. Pengukuran variabel Y	59
8. Pengukuran variabel Z	63
9. Jumlah petani binaan P4S di Kabupaten Lampung Timur	69
10. Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian	70
11. Kondisi demografi di Kabupaten Lampung Timur.....	78
12. Data P4S di Kabupaten Lampung Timur.....	79
13. Keadaan umum petani binaan berdasarkan umur	81
14. Keadaan petani binaan berdasarkan Pendidikan formal	82
15. Sistem tata kelola Lembaga P4S di Kabupaten Lampung Timur	83
16. Kerjasama dan kemitraan P4S di Kabupaten Lampung Timur.....	84
17. Kapasitas Lembaga P4S di Kabupaten Lampung Timur.....	86
18. Manajemen Lembaga P4S di Kabupaten Lampung Timur.....	88
19. Karakteristik petani binaan P4S di Kabupaten Lampung Timur.....	89
20. Sistem penghargaan P4S di Kabupaten Lampung Timur	91
21. Peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur.....	92
22. Indikator peranan P4S.....	92
23. Peranan P4S dalam melakukan pelatihan	93
24. Peranan P4S dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan	94
25. Peranan P4S dalam menumbuhkembangkan kader tani	95

26. Peranan P4S dalam mengembangkan dan diseminasi teknologi/inovasi	96
27. Peranan P4S dalam mengembangkan jejaring kerjasama.....	97
28. Sebaran tingkat keberdayaan petani binaan P4S.....	99
29. Sebaran tingkat keberdayaan petani berdasarkan kemampuan ekonomi...	100
30. Sebaran tingkat keberdayaan petani berdasarkan kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	101
31. Sebaran tingkat keberdayaan petani berdasarkan kemampuan kultural dan politis.....	102
32. Hasil uji validitas dan reliabilitas indikator	106
33. Hasil analisis R square	107
34. Hasil analisis variabel X terhadap peranan P4S.....	108
35. Hasil analisis variabel X, peranan P4S terhadap tingkat keberdayaan petani.....	114
36. Pengaruh langsung dan tidak langsung.....	123
37. Hasil uji beda sebelum dan setelah menjadi tani binaan P4S	128
38. Data penelitian petani binaan.....	141
39. Lampiran data variabel X.....	145
40. Lampiran data variabel peranan P4S	151
41. Lampiran data tingkat keberdayaan petani sebelum dibina P4S.....	154
42. Lampiran data tingkat keberdayaan petani setelah dibina P4S.....	157
43. Lampiran hasil uji validitas dan reliabilitas konstruk dengan SmartPLS3	160
44. Lampiran hasil nilai R square	160
45. Lampiran hasil uji Multikolinieritas dengan bantuan SmartPLS.....	161
46. Lampiran hasil analisis jalur pengaruh langsung dengan SmartPLS3.....	162
47. Lampiran hasil analisis jalur pengaruh tidak langsung dengan SmartPLS3	162
48. Lampiran hasil pengaruh total	163
49. Lampiran hasil analisis uji beda (<i>paired sample t test</i>).....	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran peranan P4S terhadap tingkat keberdayaan petani binaan di Kabupaten Lampung Timur dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peranan P4S dan tingkat keberdayaan petani.....	47
2. Diagram jalur penelitian.....	74
3. Model diagram jalur.....	104
4. Model substruktur 1	104
5. Model substruktur 2	105
6. Hasil analisis model substruktur	122

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya alam untuk dikembangkan pada sektor pertanian yaitu Provinsi Lampung yang dapat dilihat pada perkembangan PDRB pada Tabel 1. Berdasarkan data PDRB Lampung menurut BPS (2022) dapat diketahui bahwa sektor pertanian di Provinsi Lampung menempati urutan pertama yang berkontribusi pada perkembangan PDRB baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021. Sektor pertanian ini meliputi beberapa bidang usaha yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan jasa pertanian.

Tingginya kontribusi sektor pertanian pada perkembangan PDRB di Lampung, tentunya didukung dengan jumlah penduduk di Provinsi Lampung yang mayoritas menjadi pelaku utama dan pelaku usaha pada sektor ini. Berdasarkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2022), bahwa sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan utama bagi mayoritas penduduk yang bekerja yaitu sebesar 1.773.129 jiwa atau 49 persen dari total penduduk yang bekerja. Pelaku utama maupun pelaku usaha pada sektor ini, dalam melaksanakan pekerjaannya, perlu diimbangi dengan sumber daya petani yang unggul sehingga akan menghasilkan kegiatan usahatani yang produktif. Pada kenyataannya sebagian besar petani di Kabupaten Lampung Timur memiliki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (BPS, 2022) yang menyebabkan minimnya akses informasi teknologi/inovasi pertanian sehingga usahatani yang dijalankan terkadang masih tergolong sederhana. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas petani, seperti rendahnya tingkat pendidikan.

Pendidikan petani berkaitan dengan pengetahuan, sementara itu upaya untuk meningkatkan pengetahuan adalah adanya keterlibatan akses terhadap informasi, dengan kata lain jika seseorang memiliki informasi yang cukup maka hal itu akan berdampak kepada tingkat pengetahuannya (Dewi, 2017). Kualitas petani tidak hanya dilihat dari tingkat pengetahuannya saja, melainkan dari sikap dan keterampilan yang dimiliki, sedangkan untuk meningkatkan kualitas perlu adanya pemberdayaan petani. Berikut ini adalah tabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Provinsi Lampung menurut lapangan usaha.

Tabel 1. PDRB di Provinsi Lampung menurut lapangan usaha (juta rupiah)

Lapangan usaha	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	105.263.912,27	105.585.562,33
Industri Pengolahan	68.671.274,75	73.094.757,71
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	39.520.068,66	43.510.157,86
Konstruksi	33.166.648,13	36.765.257,87
Pertambangan dan Penggalian	17.702.493,68	20.769.872,81
Transportasi dan Pergudangan	17.774.368,50	18.479.306,95
Informasi dan Komunikasi	15.272.830,72	15.844.743,67
Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	12.825.590,59	13.320.699,66
Jasa Pendidikan	10.976.359,32	11.345.059,35
Real Estat	10.606.320,46	10.804.056,93
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.730.170,09	8.246.871,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.543.843,22	5.496.433,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.778.680,59	4.000.441,86
Jasa Lainnya	3.214.880,81	3.166.263,58
Jasa Perusahaan	529.980,15	539.293,27
Electricity and Gas	568.916,34	519.616,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	383.700,50	414.777,33
PDRB	353.530.038,78	371.903.171,89

Sumber: BPS (2022)

Pemberdayaan petani hendaknya mengarah pada pembentukan petani pada kondisi yang lebih baik, kondisi ini meliputi kondisi kognitif, konatif, afektif, dan psikomotorik. Terjadinya keberdayaan pada aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian petani (Sulistiyani, 2004). Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan (Bahua, 2015). Menurut Mutmainah dan Sumardjo (2014) bahwa masyarakat yang berdaya adalah mereka yang memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal: memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber produktif, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemberdayaan sebagai

konsep alternatif pembangunan, dengan demikian menekankan otonomi pengambilan keputusan masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan sosial melalui pengalaman langsung. Masyarakat pada umumnya akan lebih tertarik belajar dari orang lain yang usahanya telah berhasil (Ambarwati dkk., 2020). Oleh karena itu, upaya pemberdayaan tidak hanya dapat dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelaksana Penyuluhan Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Namun, masyarakat yang unggul dalam usahatani dapat melakukan pemberdayaan salah satunya melalui pembentukan lembaga pelatihan pertanian yaitu Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dengan memberikan pelatihan dan permagangan.

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan lembaga pelatihan bidang pertanian perdesaan yang dikelola dan dimiliki oleh petani, baik perorangan maupun kelompok. P4S dibentuk dari, oleh, dan untuk petani dengan prinsip keswadayaan, keterpaduan, kemitraan, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Proses penumbuhan P4S yaitu pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang usahataniya telah berhasil dan unggul sehingga layak dicontoh memiliki akses terhadap informasi terkait lembaga P4S baik dengan melakukan kunjungan kerja atau dengan informasi lain yang diperoleh melalui internet, kemudian dengan kesadaran dan kerelaan untuk mendirikan kelembagaan pelatihan pertanian. Upaya penumbuhan P4S juga dilakukan oleh penyuluh pertanian (PNS) dengan mengidentifikasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang memiliki potensi dalam usahataniya untuk mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. Hal yang dilakukan adalah dengan memotivasi, memfasilitasi, sehingga dengan kesadaran dan kerelaan sendiri mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. Upaya ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan penumbuhan kesadaran tentang peran, manfaat dan keuntungan mendirikan Kelembagaan P4S, studi banding pada P4S yang relatif berhasil, pelatihan manajemen dan kepemimpinan Kelembagaan P4S, dan fasilitasi pendirian Kelembagaan P4S. Berdasarkan hal itu, P4S yang ada di Indonesia pada tahun 2022 yaitu berjumlah 1.281 lembaga yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah P4S di Indonesia per Provinsi

Provinsi	Jumlah P4S	Provinsi	Jumlah P4S
Aceh	14	Kalimantan Utara	15
Bali	16	Kepulauan Bangka Belitung	14
Banten	48	Lampung	36
Bengkulu	35	Maluku Utara	2
DI Yogyakarta	48	Nusa Tenggara Barat	52
DKI Jakarta	37	Nusa Tenggara Timur	64
Gorontalo	21	Riau	9
Jambi	30	Sulawesi Barat	9
Jawa Barat	247	Sulawesi Selatan	17
Jawa Tengah	192	Sulawesi Tengah	15
Jawa Timur	132	Sulawesi Tenggara	18
Kalimantan Barat	24	Sulawesi Utara	15
Kalimantan Selatan	32	Sumatera Barat	39
Kalimantan Tengah	29	Sumatera Selatan	25
Kalimantan Timur	35	Sumatera Utara	11
Total		1.281	

Berdasarkan Tabel 2 bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah P4S paling banyak yaitu 247 lembaga, sedangkan jumlah P4S yang paling sedikit terdapat pada Provinsi Maluku Utara dengan jumlah 2 lembaga. Penelitian dilakukan pada P4S yang ada di Provinsi Lampung, hal ini karena teretusnya gagasan awal pendirian Lembaga pelatihan dan permagangan oleh dan untuk sesama petani yaitu pada Pekan Nasional V yang di selenggarakan di Lampung, sehingga peneliti ingin mengkaji bagaimana pertumbuhan dan perkembangan P4S yang ada di Lampung dan apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelembagaan P4S. Provinsi Lampung mempunyai 36 lembaga P4S yang berkembang dengan klasifikasi kelas yang berbeda-beda, yaitu: kelas pratama, kelas madya, dan kelas utama yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah P4S yang terdaftar di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Klasifikasi kelas P4S			Jumlah P4S
		Pratama	Madya	Utama	
1	Lampung Barat	2	-	-	2
2	Lampung Selatan	-	4	1	5
3	Metro	1	3	-	4
4	Lampung Tengah	1	3	1	5
5	Lampung Timur	1	6	-	7
6	Bandar Lampung	1	1	-	2
7	Pringsewu	2	1	1	4
8	Lampung Utara	4	1	-	5
9	Way Kanan	1	-	-	1
10	Tanggamus	-	-	1	1
11	Pesawaran	1	-	-	1

Sumber: P4S (2022)

Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten yang memiliki P4S dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada kelompok P4S yang masih berjalan hingga sekarang untuk mengetahui peranan P4S dalam pemberdayaan petani binaan di Kabupaten Lampung Timur, sehingga terdapat enam P4S yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. P4S di Kabupaten Lampung Timur

No	Nama P4S	Tahun dimulai	Jumlah penyuluh	Lokasi P4S	Komoditas Unggulan	Klasifikasi
1	Bumi Alam Purba	2012	1	Desa Kota Raman, Kec. Raman Utara	Teknologi Pertanian	Madya
2	Tyto Maju	2019	1	Desa Tegal Gondo, Kec. Purbolinggo	Peternakan (Penangkaran burung hantu)	Madya
3	Baitu Cocoa	2019	4	Desa Banjar Agung, Kec. Sekampung Udik	Perkebunan (Pembibitan tanaman kakao)	Madya
4	Agro Mulyo Lestari	2021	3	Desa Girimulyo, Kec. Marga Sekampung	Hortikulturan (Pembibitan Alpukat)	Madya
5	Tani's Market Balerejo	2021	3	Desa Balerejo, Kec. Batanghari	Hidroponik	Madya
6	Maju Bersama	2022	1	Desa Gondang Rejo, Kec., Pekalongan	Pembibitan tanaman hortikultura	Madya

Sumber: P4S (2022)

Selama ini P4S di Kabupaten Lampung Timur melayani para petani baik petani yang berasal dari dalam daerah maupun petani dari luar daerah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan/permagangan, konsultasi, penyuluhan, dan pendampingan. Pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan P4S seperti pembibitan tanaman alpukat dan pembibitan tanaman kakao merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap petani untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Tanaman kakao di Kabupaten Lampung Timur pada umumnya sudah tidak produktif karena banyak yang terserang hama dan penyakit tanaman, sehingga perlu adanya peremajaan tanaman. Adanya pelatihan pembibitan tanaman kakao menjadi pilihan yang sesuai bagi penanganan masalah yang dihadapi oleh petani, sehingga petani antusias untuk mendapatkan pelatihan dan pada umumnya petani mampu menerapkan hasil pelatihannya yaitu dengan melakukan peremajaan tanaman kakao.

Pelatihan tentang pembibitan tanaman alpukat menjadi inovasi baru yang ada di Desa Girimulyo Marga Sekampung dengan adanya pengembangan bibit alpukat yang sekarang sudah mendapat sertifikat bibit alpukat. Umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar desa tersebut tertarik mengikuti pelatihan dan didampingi oleh penyuluh P4S untuk mempelajari cara pembibitan tanaman alpukat, sebagian besar petani mampu menerapkan hasil pelatihannya dengan mengembangkan pembibitan tanaman alpukat dan menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Namun, beberapa petani juga ada yang belum mampu menerapkan hasil pelatihan, seperti petani di Desa Kota Raman yang belum mampu menerapkan hasil pelatihan mengenai usaha menyuburkan tanah pada lahan sawah dengan teknik *Integral Kultur Soil Fertilizer* dan petani Desa Balerejo Batanghari yang belum mampu menerapkan hasil pelatihan usaha hidroponik, hal ini diduga bahwa P4S belum sepenuhnya menjalankan peranannya seperti belum adanya kegiatan pelatihan tambahan, penyuluhan, dan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan kemampuan petani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 bahwa Peranan Kelembagaan Pelatihan Pertanian

Swadaya yaitu (1) menyelenggarakan pelatihan/permagangan; (2) penyuluhan dan pendampingan; (3) menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat kader tani; (4) sentra dalam pengembangan dan diseminasi teknologi/inovasi, budidaya, perbenihan, pengolahan hasil, pengembangan spesifik lokalita; dan (5) sentra pengembangan jejaring usaha tani. Hal ini juga dapat diketahui berdasarkan penelitian Yeni dkk. (2019) bahwa peranan P4S di Lampung Tengah masih tergolong dalam kategori sedang. Peranan yang belum sepenuhnya berjalan juga diduga disebabkan oleh faktor kelembagaan dan faktor luar lembaga P4S. Berdasarkan penelitian Ragasa *et al.* (2015) bahwa struktur tata kelola dan lingkungan yang mendukung, kerjasama dan kemitraan, kapasitas dan manajemen pembelajaran, serta metode penyuluhan berhubungan dengan kinerja sistem penyuluhan pertanian. Kinerja berhubungan dengan peranan karena kinerja yang baik maka orang atau lembaga tersebut menjalankan peranannya sesuai kedudukan/status (Marius dkk., 2007).

Aspek kelembagaan seperti sistem tata kelola lembaga, kerjasama dan kemitraan yang dijalin oleh lembaga, kapasitas lembaga, manajemen lembaga, dan faktor diluar lembaga yaitu karakteristik petani binaan dan sistem penghargaan ini akan berdampak pada peranan P4S yang kemudian juga akan berdampak pada tingkat keberdayaan petani binaan. Oleh sebab itu, maka dilakukan penelitian terkait peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peranan P4S dan tingkat keberdayaan petani binaan sebelum dan setelah dibina P4S di Kabupaten Lampung Timur.

2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur?
2. Sejauhmana tingkat keberdayaan petani binaan P4S di Kabupaten Lampung Timur?

3. Apakah sistem tata kelola lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas lembaga, manajemen lembaga, karakteristik petani binaan, dan sistem penghargaan berpengaruh langsung dan tidak langsung melalui peranan P4S terhadap tingkat keberdayaan petani binaan?
4. Apakah terdapat perbedaan tingkat keberdayaan petani sebelum dibina dan setelah dibina oleh P4S di Kabupaten Lampung Timur?

2.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengetahui tingkat keberdayaan petani binaan P4S di Kabupaten Lampung Timur.
3. Mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung sistem tata kelola lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas lembaga, manajemen lembaga, karakteristik petani binaan, dan sistem penghargaan terhadap tingkat keberdayaan petani binaan melalui peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur.
4. Mengetahui tingkat keberdayaan petani sebelum dibina dan setelah dibina oleh P4S di Kabupaten Lampung Timur.

2.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai media belajar bagi peneliti yang didasarkan atas teori-teori yang diperoleh sewaktu kuliah dengan yang ada di lapangan.
2. Sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga swadaya bagi Pemerintah.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Peranan

Pengertian peranan berasal dari kata peran yaitu perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat (KBBBI). Konsep ini mengasumsikan bahwa ketika orang memiliki status sosial tertentu maka perilaku mereka akan ditentukan sesuai dengan apa yang diharapkan dari status itu. Asumsi ini berdasarkan teori peranan fungsional bahwa peranan dipahami sebagai harapan yang menentukan dan menjelaskan perilaku, orang-orang dalam sistem sosial berbagi norma berperilaku untuk anggota yang menempati posisi sosial tertentu, dengan demikian orang tersebut tahu apa yang harus mereka lakukan dan semua orang dalam sistem sosial dapat diandalkan untuk mendukung norma tersebut. Alasan ini dapat menjadikan sistem sosial lebih terintegrasi dan interaksi di dalamnya berjalan lancar. Peranan merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status), hal ini dapat diketahui dari seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, sehingga orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan (Biddle, 1986). Oleh sebab itu, diketahui bahwa peranan merupakan bagian tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga aspek: Pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; Kedua, merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan Ketiga, merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pada lingkup yang lebih luas, seperti dalam organisasi sebagai

kumpulan orang-orang, peran organisasi ketika bersentuhan dengan lingkungan eksternal tidak lagi menjadi peran individu per individu dalam organisasi, tetapi sudah menjadi fungsi kolektivitas, yakni peran organisasi (Lantaeda dkk., 2017). Selanjutnya, berdasarkan teori peranan interaksionis simbolik bahwa setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya melalui interaksi sosial. Interaksi simbolik banyak membahas tentang konsep norma dan berasumsi bahwa norma diasosiasikan bersama dengan posisi sosial. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan melekat pada diri seseorang sesuai dengan status dan kedudukan di masyarakat. Unsur-unsur yang terdapat dalam peranan adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan ideal dirumuskan/diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ini meliputi hak-hak dan kewajiban yang terkait pada status tertentu. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian norma yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu pada situasi tertentu.
- 3) Peranan yang dikerjakan merupakan peranan yang dilaksanakan oleh individu yang dapat terwujud dalam pola perilaku dalam kehidupan. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan. Peranan ini juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan merupakan serangkaian pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar hidup masyarakat. Lembaga merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai. Priyono (2007) menyatakan bahwa tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh

organisasi tersebut. Peranan dari penetapan tujuan organisasi dapat memberi beberapa fungsi sekaligus manfaat yang besar bagi organisasi secara keseluruhan. Pertama, tujuan dapat berfungsi sebagai landasan operasional bagi kegiatan organisasi. Kedua, berfungsi sebagai tolok ukur atau pedoman dalam menilai keberhasilan pelaksanaan organisasi. Dalam upaya mencapai tujuan, terdapat beberapa hal yang dilakukan lembaga yaitu dengan membentuk struktur untuk memudahkan komunikasi dan pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian anggota.

Suatu lembaga dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehingga lembaga tersebut mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga juga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur. Artinya, tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Salah satu lembaga yang ada di Indonesia yaitu lembaga pertanian. Kelembagaan petani dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peranan yaitu: (1) tugas dalam organisasi untuk memediasi masyarakat dan negara; (2) tugas sumberdaya mencakup mobilisasi sumberdaya lokal seperti tenaga kerja, modal, informasi, dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat; (3) tugas pelayanan untuk menjembatani terhadap akses modal, input dan output pertanian; (4) tugas antar organisasi memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar (Anantanyu, 2011). Kelembagaan petani dalam pembahasan ini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas seperti lembaga pelatihan pertanian yaitu Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).

2.1.3 Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) merupakan lembaga yang didirikan secara swadaya oleh petani baik perorangan maupun kelompok. Sejarah P4S digagas pada saat penyelenggaraan PENAS V di Lampung Tengah pada tanggal 20-25 Agustus Tahun 1983, saat itu teretusnya gagasan awal untuk mengembangkan pelatihan dan magang oleh dan untuk sesama petani-nelayan. Setelah itu, sejumlah petani-nelayan mulai memelopori penyelenggaraan magang

di wilayah kerja masing-masing. Pada awal tahun 1990-an disepakati nama pelatihan/magang tersebut dengan nama Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Tujuan utama pembentukan P4S adalah untuk mempercepat akses dan penerapan informasi teknologi melalui proses pembelajaran sesama petani beserta keluarganya sesuai kondisi nyata di lapangan. Selain itu, dengan berlatih dan magang di P4S, petani diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan hidupnya.

Pada akhir tahun 1993 P4S yang tumbuh hanya 14 P4S di 10 Provinsi, dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1995 jumlah P4S meningkat menjadi 46 yang tersebar di 20 Provinsi dan demikian seterusnya jumlah P4S bertambah hingga tahun 2022 P4S yang ada di Indonesia berjumlah 1.281. Pada tanggal 22 Oktober 2001 bersamaan dengan PENAS X di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, terbentuk wadah bersama P4S seluruh Indonesia dengan nama Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (FK-P4S). Tujuan FK-P4S adalah meningkatkan jejaring kerja antar P4S seluruh Indonesia, menyalurkan aspirasi anggota P4S kepada Pemerintah dan membantu Pemerintah dalam menumbuhkembangkan P4S di seluruh Indonesia.

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) adalah kelembagaan pelatihan dengan metode permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha secara swadaya baik perorangan maupun kelompok. P4S merupakan kelembagaan pelatihan/permagangan petani yang tumbuh dan berkembang dari petani, oleh petani, dan untuk petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian di wilayahnya. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Sedangkan, Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian (Permentan, 2016). P4S memiliki visi yaitu terwujudnya sumber daya manusia pertanian yang tangguh, berdaya saing dan berkarakter, sedangkan misinya yaitu (1) Mewujudkan pengelolaan P4S yang maju dan terakreditasi; (2) Mewujudkan jejaring kerjasama

antara P4S baik dalam pelatihan maupun usaha; (3) Mewujudkan penumbuhan P4S baru yang dikelola oleh petani muda.

2.1.3.1 Prinsip Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Prinsip Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya adalah sebagai berikut:

- 1) Keswadayaan: Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan, peran, dan kemandirian kelembagaan melalui kompetensi penyuluh dalam mengatasi permasalahan.
- 2) Keterpaduan: Penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan bagian integral pembangunan pertanian dan perdesaan secara selaras, serasi, dan sinergi.
- 3) Kemitraan: Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan mitra kerja pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama pelaku utama dan/atau pelaku usaha.
- 4) Kemanfaatan: Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memberikan manfaat kepada pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya.
- 5) Berkelanjutan: Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dilaksanakan secara terarah dan sistematis untuk mencapai kemandirian.

2.1.3.2 Ciri Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Ciri Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki keunggulan dalam melakukan usahatani perdesaan dan kesukarelaan berbagi mengenai pengetahuan, teknologi dan keterampilan kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha lain yang ditumbuhkembangkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
- 2) Mempunyai lahan usahatani dan/atau kegiatan agribisnis perdesaan yang layak dipelajari, dicontoh, dan ditiru oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha lain;
- 3) Melayani masyarakat untuk kegiatan berlatih, magang, berkonsultasi dan/atau kunjungan/studi banding;
- 4) Berada di lingkungan usahatani atau perdesaan yang mendukung proses belajar mengajar untuk peserta; dan
- 5) Memiliki instruktur/pelatih, fasilitator lainnya yang profesional.

2.1.3.3 Peranan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Peranan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya sebagai:

- 1) Lembaga penyelenggara pelatihan dan permagangan untuk pelaku utama dan/atau pelaku usaha lain;
- 2) Lembaga yang turut andil dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan pelaku utama dan/atau pelaku usaha lain;
- 3) Lembaga yang turut menumbuhkembangkan dan memperkuat kader tani;
- 4) Sentra dalam pengembangan dan diseminasi teknologi/inovasi, budidaya, perbenihan, pengolahan hasil, pengembangan spesifik lokalita; dan
- 5) Sentra pengembangan jejaring usahatani.

2.1.3.4 Penumbuhan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Penumbuhan merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari identifikasi, fasilitasi untuk menumbuhkan kesadaran dan minat melalui pemberian pengetahuan baru tentang maksud, tujuan dan manfaat P4S serta kebutuhan pelatihan sampai terbentuknya kelembagaan yang memperoleh pengakuan sebagai Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

1) Dasar Penumbuhan

1. Berasal dari pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang memiliki keunggulan dalam melakukan Usaha Tani, baik *on farm* (budidaya) melalui penerapan Norma Budidaya yang Baik (GAP) maupun *off farm* (pasca panen dan pengolahan hasil) atau GHP, GMP, GDP dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
2. Memiliki jiwa kesukarelaan/berjiwa *volunteer* (mau berbagi pengetahuan/pengalaman dan keterampilan).

2) Proses Penumbuhan

Pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang diidentifikasi dan memiliki potensi untuk mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, perlu dimotivasi, difasilitasi, sehingga dengan kesadaran dan kerelaan sendiri mendirikan

Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. Proses penumbuhan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. Sosialisasi dan penumbuhan kesadaran tentang peran, manfaat dan keuntungan mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
2. Studi banding pada P4S yang relatif berhasil;
3. Pelatihan manajemen dan kepemimpinan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya; dan
4. Fasilitasi pendirian Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan berdasarkan indikator klasifikasi kelas P4S menjadi kelas pratama, atau madya atau utama bahkan aditama sesuai form terlampir.

3) Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya didasarkan pada pelaksanaan peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, dalam ruang lingkup penumbuhkembangan kader tani di perdesaan, penyelenggaraan pelatihan/permagangan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan penyuluhan swadaya, terbagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu:

1. Kelas Pratama
 - a. Memiliki potensi untuk menyelenggarakan pelatihan/permagangan ditinjau dari sarana prasarana dan teknologi yang tersedia;
 - b. Telah melakukan kegiatan permagangan swadaya pelaku utama dan/atau pelaku usaha, siswa sekolah dan mahasiswa;
 - c. Keunggulan usahatani yang dikembangkan mempunyai dampak dalam pengembangan ekonomi lokal disekitarnya;
 - d. Memiliki kemauan kuat untuk mencari, menemukan, merekayasa cara-cara usahatani yang lebih baik dan mentransfer teknologi yang dikembangkan;
 - e. Dikenal oleh masyarakat sekitarnya dan tercatat oleh lembaga yang menangani penyuluhan; dan

- f. Sumber daya manusia pengelola telah mengikuti diklat atau memiliki kompetensi pengelolaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya (berkaitan dengan administrasi, organisasi dan manajemen).

2. Kelas Madya

Kelas Madya memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

- a. Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama;
- b. Telah menyelenggarakan diklat terstruktur (merencanakan, menyiapkan materi, melaksanakan, mengevaluasi dan bimbingan lanjutan);
- c. Telah melaksanakan upaya menumbuhkembangkan kader tani;
- d. Telah mengikuti Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian;
- e. Telah mengikuti Diklat Manajemen Permagangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya; dan
- f. Telah mengikuti Diklat Instruktur Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

3. Kelas Utama

Kelas Utama memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

- a. Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama dan Madya;
- b. Telah menyelenggarakan pelatihan/permagangan secara mandiri;
- c. Telah melaksanakan penyuluhan swadaya secara mandiri; dan
- d. Telah mengakses sumber teknologi dan pendanaan secara mandiri.

4. Kelas Aditama

Kelas Aditama memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

- a. Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama, Madya dan Utama;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pelatihan/permagangan dan pendampingan secara mandiri;
- c. Mewujudkan produk kreasi dan inovasi (krenova);
- d. Mewujudkan jejaring kerjasama dalam pengembangan teknologi;
- e. Menciptakan pasar.

2.1.3.5 Sertifikasi Lembaga P4S

- 1) Sertifikasi dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya di dalam melaksanakan perannya;

- 2) Semua Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang telah memenuhi kriteria baku/standar perlu diberi sertifikat;
- 3) Sertifikasi dilakukan oleh lembaga pembina yang berwenang melalui proses sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Sertifikasi untuk Kelas Pratama ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kelas Madya ditandatangani oleh Bupati/Walikota, Kelas Utama ditandatangani oleh Gubernur, dan Kelas Aditama ditandatangani oleh Menteri Pertanian;
- 5) Hasil Sertifikasi disampaikan kepada kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang bersangkutan, pemerintah daerah dan Asosiasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya Indonesia; dan
- 6) Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penilaian kembali untuk menetapkan kelas kemampuannya.

2.1.3.6 Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan seluruh rangkaian dalam rangka memperkuat kelembagaan pelatihan pertanian swadaya melalui kegiatan apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, pelatihan/permagangan, pengkaderan, penyuluhan, pengembangan teknologi tepat guna dan promosi.

- 1) Apresiasi diberikan kepada Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang telah menunjukkan prestasi istimewa melalui penghargaan.
- 2) Sosialisasi diberikan kepada lembaga donor, pihak swasta dan/atau kementerian/lembaga sehingga Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memiliki akses lebih luas dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
- 3) Fasilitasi dapat diberikan melalui tahapan kemandirian dan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, sebagai berikut:
 1. Kelas Pratama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pendampingan secara intensif dan apresiasi;
 2. Kelas Madya diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pelatihan/permagangan non aparatur dan apresiasi;
 3. Kelas Utama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pelatihan/permagangan non aparatur, pelatihan/permagangan CSR dan apresiasi; dan

4. Kelas Aditama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pelatihan/permagangan non aparatur, pelatihan/permagangan CSR, pelatihan/permagangan internasional dan apresiasi;
- 4) Pendampingan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya diarahkan untuk mewujudkan kemandirian, profesionalisme yang memiliki kompetensi dalam menumbuhkan kader tani di pedesaan, pelatihan/permagangan pelaku utama dan/atau pelaku usaha. Kegiatan pendampingan meliputi aspek manajemen, budidaya, teknologi dan pemasaran.
- 5) Pelatihan/permagangan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menyiapkan bahan, melaksanakan, menerapkan metodologi, evaluasi dan bimbingan lanjutan, teknologi serta pengembangan pasar.
- 6) Pengkaderan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kader tani di pedesaan agar Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya mampu menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain dalam penumbuhan apresiasi, minat dan kecintaan generasi muda dibidang pertanian.
- 7) Penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya memiliki kompetensi dalam pemberdayaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta kelembagaan petani.
- 8) Pengembangan Teknologi Tepat Guna diarahkan untuk mengembangkan inovasi teknologi dalam rangka pengembangan usahatani.
- 9) Promosi diarahkan untuk memperluas jejaring usaha dan pengembangan informasi teknologi.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.4.1 Pemberdayaan

Tanggungjawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau

kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia, upaya ini meliputi:

- 1) Penyediaan berbagai masukan dan peningkatan taraf pendidikan, meningkatkan pendidikan melalui apa yang dimiliki dengan fasilitas-fasilitas yang ada dan memperkuat modal.
- 2) Mendorong dan memotivasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan potensinya dalam menciptakan suasana untuk berkembang.
- 3) Memperkuat daya dan potensi, yang dimiliki dengan langkah-langkah positif dalam memberdayakan dengan tujuan yang ada.

Praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Berdasarkan hal itu, kegiatan pemberdayaan sering dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan, seperti itu tidaklah salah, tetapi belum cukup. Sebab hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan, kekuasaan dan keberanian, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mandiri demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Masyarakat yang mandiri bukan berarti menolak bantuan pihak luar, tetapi kemandirian merupakan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, seperti: (a) Keadaan sumberdaya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan; (b) Penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (c) Sikap kewirausahaan dan keterampilan manajerial yang dikuasai; (d) Kesesuaian sosial-budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun temurun (Bahua, 2015).

Berkaitan dengan hal ini, Ife dan Frank (2008) menyebutkan bahwa keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat

adalah mereka yang kurang berdaya dan belum memiliki kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian merupakan suatu kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak bergantung pada orang lain, artinya seseorang tersebut mampu mengetahui, mengidentifikasi, mengendalikan dan memutuskan apa yang menjadi kebutuhan demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, afektif, dan psikomotorik serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat (Sulistiyani, 2004).

Sarana yang digunakan untuk mencapai kemandirian adanya keswadayaan. Swadaya adalah setiap tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Keterbatasan terhadap akses kepemilikan sumberdaya menyebabkan tingkat kemandirian yang rendah, sehingga ketergantungan terhadap faktor eksternal sangat tinggi. Penyatuan potensi dan penumbuhan nilai-nilai untuk menghargai diri sendiri dan sesama, kepercayaan, komunikasi, dan

kerjasama yang diwujudkan dalam suatu wadah kelompok diyakini menjadi strategi dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Christenson dan Robinson 1989 dalam ECDPM (2006) bahwa kemandirian individu dapat terwujud melalui proses-proses sosial dalam kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Melalui interaksi yang dibangun antar individu dalam masyarakat terjadi proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kapasitas individu. Kapasitas petani yaitu kemampuan petani untuk melakukan usaha tani, mempunyai kesanggupan dalam menghadapi tantangan, dan memenuhi syarat sebagai petani yang unggul sesuai dengan bidangnya.

2.1.4.2 Indikator Keberdayaan

Indikator keberdayaan digunakan untuk menunjukkan seseorang itu dapat dikatakan berdaya atau tidak, sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat difokuskan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan. Suharto (2021) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang biasa disebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Kebebasan mobilitas; kemampuan individu untuk melakukan aktivitas diluar rumah atau keluar di wilayah tempat tinggalnya, seperti berbelanja ke pasar, rumah ibadah, fasilitas medis, dll.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil; kemampuan individu untuk membeli barang yang menjadi kebutuhan dasar.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli barang sekunder atau tersier.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga; kemampuan individu untuk membuat keputusan secara mandiri atau bersama pasangannya mengenai kepentingan keluarganya.
- 5) Kebebasan relatif dari dominansi keluarga; kebebasan individu dari pengaruh keluarganya.
- 6) Kesadaran hukum dan politik; kemampuan individu untuk sadar akan hukum dan kepentingan politik.

- 7) Keterlibatan dalam kampanye; kemampuan individu untuk menyuarakan pendapatnya terhadap fenomena yang dianggap tidak wajar seperti penyalahgunaan kekuasaan.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; kemampuan individu untuk memiliki jaminan ekonomi dalam keluarganya seperti rumah, tanah, dan aset lain.

Masyarakat dikatakan berdaya apabila memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal: memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan artinya mereka bebas untuk mengungkapkan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan; mampu menjangkau sumber produktif untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan; berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Mutmainah dan Sumardjo, 2014; Suharto, 2021).

Indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam memperbaiki kehidupannya melalui aksesibilitas informasi teknologi, keterlibatan/partisipasi dalam pembangunan, kapasitas organisasi berupa kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga masyarakat serta mobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi (Bahua, 2015).

Menurut Ife dan Frank (2008) bahwa ciri-ciri masyarakat berdaya yaitu memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai. Aspek kognitif (pengetahuan) masyarakat yang berdaya memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang jauh ke depan, mengetahui potensi dan kebutuhannya, mampu memahami unsur manajemen dan kepemimpinan. Aspek konatif (sikap) masyarakat yang berdaya yaitu percaya diri, pantang menyerah, selektif, komunikatif, jujur dan bertanggungjawab, terbuka untuk bekerjasama dan peduli terhadap sesama. Aspek psikomotorik (keterampilan) yaitu masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki secara tepat, mampu menerapkan unsur manajemen kepemimpinan dan kehidupan secara baik, mampu mencari dan memanfaatkan informasi dan peluang baru, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Susetiawan (2004) menjelaskan bahwa masyarakat yang berdaya dikategorikan dalam tiga aspek yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat yang berdaya secara politik adalah mereka yang dapat mengartikulasikan (menyampaikan perwujudan) kepentingannya, secara ekonomi dapat melakukan tawar-menawar dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi, secara sosial dapat mengelola komunitas dan mengambil keputusan secara mandiri, dan secara budaya mereka diakui eksistensinya.

Lebih lanjut, Suharto (2021) menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan kultural dan politis. Ketiga indikator keberdayaan tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan di dalam (*power within*) : meningkatkan kesadaran untuk berubah
- 2) Kekuasaan untuk (*power to*): meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses
- 3) Kekuasaan atas (*power over*): perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan tersebut
- 4) Kekuasaan dengan (*power with*): meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat, dan makro.

2.1.5 Kelompok Tani

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota (BPPSDMP, 2018). Departemen Pertanian

mendefinisikan kelompok tani merupakan wadah sebagai tempat atau forum dan sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu kawasan yang sama dan terorganisasi satu sama lain secara musyawarah. Lebih lanjut Departemen merumuskan Azas kelompok tani dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kesamaan kepentingan, dasar pembentukan kelompok tani adalah kesamaan kepentingan yang diwujudkan dalam suatu tujuan kelompok. Tujuan dan cara pencapaiannya ditetapkan secara bersama-sama. Pembagian dan pendelegasian pencapaian tujuan terwujudnya dalam suatu kepengurusan kelompok yang disepakati bersama.
- 2) Kesamaan kawasan, kesamaan ini akan memudahkan komunikasi antar anggota. Intensitas komunikasi akan tinggi bila jarak dan anggota tidak besar, sehingga kekompakan kelompok dapat mudah terbentuk. Oleh karena itu, jumlah anggota yang efisien dalam satu kelompok yaitu 10-25 orang.
- 3) Musyawarah merupakan pondasi dari kelompok tani dimana kepentingan setiap anggotanya diapresiasi. Segala keputusan berada ditangan para anggota yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama. Dalam keberhasilan suatu kelompok tani juga harus menjadi kelompok yang aktif dalam melakukan semua kegiatan kelompok.

Menurut BPPSDMP (2018), kemampuan kelompok tani adalah kapasitas/kompetensi yang dimiliki kelompok tani dalam menjalankan fungsi dan peran kelembagaannya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis. Klasifikasi kemampuan kelompok tani adalah pemeringkatan kemampuan kelompok tani ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan Panca Kemampuan Kelompok tani (PAKEM POKTAN), yaitu: kemampuan merencanakan, kemampuan mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. Indikator penilaian kelas kemampuan kelompok tani merupakan rincian kegiatan dalam menjalankan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:

- a) Aspek kemampuan merencanakan, terdiri dari indikator:
 - 1) Merencanakan kegiatan belajar (nilai maksimum 50);
 - 2) Merencanakan usaha (nilai maksimum 150).
- b) Kemampuan mengorganisasikan, yang terdiri dari:
 - 1) Struktur Organisasi (nilai maksimum 25);
 - 2) Aturan dan Norma (nilai maksimum 25);
 - 3) Administrasi pembukuan (nilai maksimum 100).
- c) Kemampuan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) Pertemuan rutin (nilai maksimum 40);
 - 2) Kegiatan belajar (nilai maksimum 50);
 - 3) Pelaksanaan usaha (nilai maksimum 200);
 - 4) Pemupukan modal (nilai maksimum 50);
 - 5) Pelayanan informasi dan teknologi (nilai maksimum 60)
- d) Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, dengan indikator Evaluasi usaha kelompok (nilai maksimum 100)
- e) Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok, dengan indikator pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus (nilai maksimum 150).

Penetapan kelas kemampuan kelompok; ditetapkan berdasarkan hasil penilaian setiap kelompok oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dengan penetapan kelas sebagai berikut: (a) Kelas Pemula mempunyai nilai sampai dengan 245; (b) Kelas Lanjut mempunyai nilai 246-455; (c) Kelas Madya mempunyai nilai 456-700; (d) Kelas Utama mempunyai nilai 701-1.000.

2.1.6 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, membahas variabel yang berpengaruh terhadap peranan lembaga menurut kerangka kerja Birner *et al.* (2009) yaitu sistem tata kelola lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas lembaga, manajemen lembaga, karakteristik petani, dan sistem penghargaan.

1) Sistem Tata Kelola Lembaga

Tata kelola lembaga sebagai sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan lembaga. Tata kelola mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam lembaga yang berfungsi sebagai pedoman pengevaluasian kinerja dan manajemen lembaga. Voley (2002) juga mendefinisikan tata kelola lembaga sebagai suatu sistem, struktur, dan proses di dalam kelembagaan. Tata kelola lembaga mengacu pada sekumpulan komponen yang dikendalikan dan diorganisasikan untuk menjalankan kegiatan lembaga. Komponen ini meliputi proses, struktur (mekanisme), dan partisipan atau anggota. Proses digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan lembaga dan menyelaraskan perilaku lembaga dengan harapan masyarakat. Struktur digunakan untuk menspesifikasikan pendistribusian hak dan tanggungjawab anggota sesuai dengan kepentingan masing-masing dan menjelaskan aturan maupun prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan lembaga. Tujuan dari pengelolaan lembaga adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumberdaya dan mendorong kemajuan lembaga (Wibowo, 2010). Prinsip tata kelola lembaga berdasarkan OECD (2003) sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparancy*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relavan mengenai lembaga. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat.

2. Kemandirian (*independency*)

Suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menuntut para pengelola lembaga agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional lembaga yang berlaku.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan visi, misi, tujuan, target kinerja, fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif, efisien, dan ekonomis. Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh anggota lembaga.

4. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari lembaga.

Tata kelola lembaga yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, tanggungjawab, dan kewajaran. Suatu lembaga dapat dikatakan berhasil apabila lembaga tersebut memiliki visi, misi, target kinerja, dan dapat mencapai tujuannya (Ragasa *et al.*, 2015). Berdasarkan penelitian Mekannon *et al.* (2020) bahwa tidak adanya visi dan misi yang dirumuskan bersama dengan jelas, serta tidak adanya tujuan atau target kinerja yang terukur menyebabkan sistem penyuluhan dan evaluasi untuk menilai kinerja lembaga tidak efektif. Oleh karena itu, tata kelola lembaga yang baik sama pentingnya dengan memotivasi perilaku anggota secara tepat untuk meningkatkan kinerja seperti halnya mengendalikan secara langsung perilaku pemangku kepentingan. Mengingat hal di atas, jelas bahwa rekomendasi kebijakan tentang tata kelola lembaga perlu menangani aspek pengaturan kelembagaan seperti visi dan misi yang jelas, tujuan dan target kinerja yang dapat diukur, dan hak serta tanggungjawab anggota.

2) Kerjasama dan Kemitraan

Hubungan kerjasama dan keterkaitan mencakup berbagai kolaborasi dan pertukaran informasi yang berguna diantara berbagai pihak. *Linkage* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dua sistem dihubungkan oleh pesan

sehingga membentuk suatu sistem yang lebih besar. Jika hambatan antara dua sistem ini dapat diselesaikan melalui pesan dan tanggapan yang disampaikan oleh keduanya, maka link telah dibuat antara keduanya atau adanya kerjasama dan keterkaitan. Menurut Munyua *et al.* (2002) bahwa penelitian dan penyuluhan pertanian adalah contoh dari dua sistem yang dapat dihubungkan oleh arus informasi dan umpan balik. Petani berada di antara peneliti dan penyuluh dan diharapkan menjadi sasaran utama dan penerima manfaat dari kegiatan kedua sistem ini. Hubungan penelitian-penyuluhan-petani harus dilihat sebagai suatu kontinum yang saling terkait. keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani untuk mencegah isolasi, yang menghambat difusi inovasi/teknologi. Ikatan yang erat di antara tiga aktor juga mendorong pengembangan teknologi relevan yang memberikan hasil yang dapat diukur secara langsung atau manfaat yang dirasakan bagi populasi sasaran dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

Penelitian sebelumnya di negara berkembang telah mengidentifikasi adanya hubungan yang lemah antara penelitian dan penyuluhan menjadi faktor utama yang membatasi arus informasi, pengetahuan, teknologi baru yang berguna, dan sumberdaya di antara para pelaku dalam sistem pemanfaatan penyampaian teknologi (Munyua *et al.*, 2002). Hubungan penelitian dan penyuluhan yang buruk bahwa penyuluh sering melihat peneliti bekerja namun inovasi/teknologi yang dihasilkan tidak sesuai dengan sistem pertanian yang ada saat itu, sedangkan peneliti sering mempertanyakan kemampuan penyuluh untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Selanjutnya, Kassa dan Alemu (2017) menunjukkan bahwa menjembatani kesenjangan antara penelitian dan penyuluhan (memperkuat keterkaitan mereka) adalah masalah kelembagaan yang paling serius dalam mengembangkan program penelitian dan penyuluhan. Tujuan utama penguatan hubungan penelitian dan penyuluhan harus menumbuhkan interaksi yang lebih besar dan lebih efektif di antara para pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan dengan demikian meningkatkan taraf hidup penduduk pedesaan. Akan tetapi, harus ditekankan bahwa strategi yang ditujukan untuk memperkuat hubungan penelitian dan penyuluhan akan berbeda dari satu negara ke negara lain tergantung pada hubungan kerja historis antara organisasi penelitian dan penyuluhan serta struktur

organisasi mereka, daya tanggap terhadap tantangan yang terus berkembang dan seberapa berbeda atau konvergen tujuan mereka (Agbamu, 2000).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan berbagai pihak yang bekerjasama. Konsep kemitraan berarti melibatkan hubungan kerja antar aktor. Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum yang sama. Oleh karena itu, menciptakan hubungan kerja kemitraan perlu dilakukan tatanan kelembagaan (*re-organization*) yang sesuai dan mampu meyakinkan semua pihak yang bermitra tentang arti penting dari sebuah kerja bersama (Mappasere, 2014). Umumnya bentuk relasi kemitraan berkembang dari kemungkinan hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan. Pemangku kepentingan dibagi atas 3 (tiga) yaitu: 1) stakeholder yang berasal dari sektor publik (pemerintah pusat dan pemerintah daerah/kota), 2) stakeholder dari sektor swasta (perusahaan formal dan informal), dan 3) stakeholder yang berasal dari masyarakat sipil (NGO, kelompok akademisi, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran). Ketiga sektor ini saling berinteraksi dalam kemitraan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Terbentuknya suatu hubungan kerja diantara ketiga kelompok utama pemangku kepentingan terjadi sebagai akibat adanya saling ketergantungan yang timbul dari kebutuhan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan tugas tertentu secara efektif melalui pengerahan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada pada pihak lain. Pada hubungan kemitraan, seluruh pihak bekerjasama dan membangun konsensus untuk mencapai suatu keputusan yang menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Relasi antar pihak bersifat terus menerus dan oleh karenanya kemitraan bersifat dinamis dan saling tergantung (*interdependence*). Sebagai konsep yang dinamis, kemitraan merupakan proses yang bersifat incremental melalui tahapan-tahapan: (1) *Preparing for the partnership* (pengorganisasian); (2) *Negotiating co-management plans and agreements* (mengembangkan kesepakatan); (3)

Implementing and revising the plans and agreements (belajar sambil bekerja). Berdasarkan penelitian Mappasere (2014) bahwa upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan dan kontribusi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membentuk suatu kerangka kerja kemitraan yang menjelaskan peran, status, dan kontribusi dari masing-masing institusi yang terlibat mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kontribusi ini memiliki dampak terhadap keberhasilan memberdayakan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kemitraan meliputi beberapa hal berikut, yaitu; meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat; meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan; memperluas kesempatan kerja; meningkatkan ketahanan ekonomi nasional; tercapainya produktivitas yang tinggi; tercapainya efisiensi; jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; penanganan resiko; meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; menumbuhkan ekonomi pedesaan, daerah, dan nasional.

Kerjasama antar aktor sangat penting dalam hal diseminasi teknologi/inovasi yang diciptakan oleh peneliti dalam sistem penelitian dan dikembangkan melalui penyuluhan pertanian. Hal ini adalah hubungan kolaboratif antar aktor secara terdesentralisasi dan sangat penting untuk menciptakan pengetahuan, inovasi, dan pembelajaran yang relevan bagi petani. Kerjasama dan kemitraan oleh penyuluh dengan pemerintahan, peneliti, penyuluh lain, pemasok input pertanian, dan pelaku pasar sangat penting untuk kinerja lembaga agar peranannya dapat efektif dalam sistem penyuluhan pertanian (Ragasa *et al.*, 2015 dan Mekannon *et al.*, 2020).

3) Kapasitas Lembaga

Kapasitas lembaga mencakup sumberdaya yang ada di dalamnya yang mengacu pada kuantitas dan kualitasnya, seperti jumlah penyuluh, kompetensi penyuluh, motivasi penyuluh, serta sarana dan prasarana. Berikut penjabaran masing-masing indikator kapasitas Lembaga.

1. Jumlah Penyuluh Swadaya

Kebijakan Departemen Pertanian dalam program revitalisasi penyuluhan pertanian, mengamanatkan setiap desa mempunyai satu orang penyuluh PNS. Berdasarkan UU RI Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan bahwa penyuluh swasta dan penyuluh swadaya berkordinasi dengan penyuluh PNS dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Rasio penyuluh-petani di DRC adalah 1:540 Ragasa *et al.* (2015), sedangkan menurut Anderson dan Feder (2004) bahwa rasio penyuluh terhadap petani di sebagian Negara berkembang adalah 1:1000.

2. Kompetensi Penyuluh Swadaya

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik dalam satu lingkungan kerja yang dilakukan dengan penuh tanggungjawab, sehingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan peranan dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang, sehingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugasnya. Kompetensi profesional penyuluh merupakan derajat kemampuan yang dimiliki penyuluh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara efektif. Kompetensi inti yang harus dikuasai penyuluh profesional, yaitu:

- a. Melaksanakan aksi sosial, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memonitor variabel-variabel dan isu-isu penting bagi vitalitas masyarakat seperti: demografis, ekonomi, lingkungan dan kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan variabel-variabel dalam memprioritas program, perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Mengapresiasi keragaman budaya, kemampuan untuk mengapresiasi keragaman budaya, kesadaran, komitmen dan kemampuan untuk rasa

- memiliki, seperti: budaya yang berbeda, asumsi-asumsi, norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai.
- c. Merancang program penyuluhan, kemampuan merencanakan, desain, penerapan, mengevaluasi, program pendidikan penyuluhan untuk memperbaiki mutu hidup penyuluh.
 - d. Mempertemukan sumberdaya dengan kebutuhan petani, kemampuan untuk mengenali, memahami, memudahkan peluang dan sumberdaya yang diperlukan merupakan respon terbaik terhadap kebutuhan dari individu dan masyarakat.
 - e. Mengelola informasi, informasi dan pengantar pendidikan penguasaan keterampilan berkomunikasi (seperti: lisan dan tulisan), penerapan teknologi dan metode pengantar untuk mendukung program-program pendidikan dan memandu perubahan perilaku antar penyuluh.
 - f. Hubungan interpersonal, hubungan-hubungan antar pribadi yakni kemampuan interaksi dengan individu dan kelompok-kelompok yang berbeda untuk menciptakan *partnerships*, jaringan, dan kerjasama.
 - g. Pemahaman organisasi penyuluhan, pengetahuan tentang organisasi, pemahaman sejarah, filsafat dan sifat dari penyuluhan.
 - h. Kepemimpinan, kemampuan untuk memengaruhi individu dan kelompok-kelompok yang berbeda secara positif.
 - i. Mengelola organisasi, kemampuan untuk menetapkan struktur, mengorganisir proses, berkembang dan memonitor sumberdaya dan memimpin perubahan untuk memperoleh hasil-hasil bidang penyuluhan secara efektif dan efisien.
 - j. Profesionalisme, peragaan perilaku mencerminkan tingginya tingkat dari kinerja, suatu etika kerja yang kuat, komitmen untuk penyuluhan yang berkesinambungan untuk visi, misi, dan sasaran penyuluhan.
 - k. Bidang keahlian, suatu kecakapan teknis guna meningkatkan efektivitas individu dan organisasi.

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa kompetensi penyuluh berpengaruh terhadap kinerja (Bahua, 2010). Kinerja yang baik maka orang tersebut telah menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan/status (Marius dkk., 2007).

3. Motivasi Penyuluh Swadaya

Setiap individu cenderung melakukan sesuatu karena dilatarbelakangi oleh tingkat motivasinya. Tingkat motivasi sangat dipengaruhi oleh motif primer dan motif sekunder. Motif primer adalah motif dasar yang ada pada diri seseorang yang berlandaskan pada sejauhmana kebutuhannya dapat terpenuhi, sedangkan motif sekunder adalah motif yang timbul dari luar diri sendiri atau dapat diperoleh karena pengaruh lingkungan eksternal (Priyono, 2007). Motivasi merupakan kekuatan batin yang mendorong individu untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi.

Maslow (1956) mengembangkan motivasi melalui hierarki kebutuhan individu. Setiap individu termotivasi dengan adanya kebutuhan yang menjadi bawaan sejak lahir untuk bertahan hidup. Hierarki kebutuhan dari teori Maslow dijelaskan pada bagian berikut:

- 1) Kebutuhan fisiologis (*physiological need*), yaitu kebutuhan dasar individu seperti kebutuhan akan pangan, sandang, pangan, dll.
- 2) Kebutuhan akan rasa aman dan selamat (*safety need*), yaitu kebutuhan yang mengarah pada rasa keamanan, ketentraman dan jaminan seseorang dalam kedudukan, jabatan, wewenang, dan tanggungjawabnya dalam mengemban tugas yang diberikan. Dia dapat bekerja dengan baik dan penuh produktivitas bila ada jaminan formal atas kedudukan dan wewenangnya.
- 3) Kebutuhan akan cinta dan harta atau kebutuhan sosial (*social need*), Kebutuhan akan kasih sayang dan bersahabat (kerjasama) dalam kelompok kerja atau antar kelompok. Kebutuhan akan diikutsertakan, meningkatkan relasi dengan pihak-pihak yang diperlukan dan tumbuhnya rasa kebersamaan termasuk adanya *sense of belonging* dalam organisasi.
- 4) Kebutuhan akan penghargaan atau prestasi (*esteem need*), yaitu kebutuhan akan kedudukan dan promosi di bidang kepegawaian. Kebutuhan akan simbol-simbol dalam statusnya serta prestis yang ditampilkannya.
- 5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization*), setiap orang ingin mengembangkan kapasitas kerjanya dengan baik. Hal ini merupakan

kebutuhan untuk mewujudkan segala kemampuan dan seringkali terlihat pada hal-hal yang sesuai untuk mencapai citra dan cita diri seseorang. Motivasi kerja pada tingkat ini diperlukan kemampuan manajemen yang dapat mensinkronisasikan antara citra diri dan citra lembaga untuk dapat melahirkan hasil produktivitas lembaga yang lebih tinggi.

Istilah “hierarki” dapat diartikan sebagai urutan tingkatan atau secara analogi berarti anak tangga. Logikanya yaitu menaiki suatu tangga berarti dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jika konsep tersebut diaplikasikan pada pemuasan kebutuhan manusia, berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan tingkat kedua, dalam hal ini keamanan sebelum kebutuhan tingkat pertama yaitu sandang, pangan dan papan terpenuhi; yang ketiga tidak akan diusahakan pemuasan sebelum seseorang merasa aman, demikian pula seterusnya. Pemenuhan tentang berbagai kebutuhan manusia makin mendalam penyempurnaan dan koreksi dirasakan bukan hanya tepat, akan tetapi sangat diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya, sambil memuaskan kebutuhan fisik, seseorang pada waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, memerlukan teman serta ingin berkembang.

Motivasi merupakan kondisi yang mendorong, menggerakkan, mengendalikan, membangkitkan usaha, menumbuhkan perasaan, pengambilan prakarsa dan usaha individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang fasilitator/penyuluh pertanian yang mempunyai motivasi tinggi akan berdampak pada peranan yang tinggi pula dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh lembaga atau organisasi (Bahua, 2015).

4. Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan pekerjaan.

Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama

terselenggaranya pekerjaan. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dapat dilakukan secara optimal, maka diperlukan sarana dan prasarana kerja seperti: a) ketersediaan fasilitas seperti lahan demplot, listrik, internet, telepon untuk menunjang kegiatan praktik penyuluhan, pengujian dan percontohan; b) mobilitas menuju lokasi yang berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar penyuluh untuk datang ke lokasi penyuluhan atau wilayah binaan; c) perlengkapan dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang berupa leaflet, brosur dan buku-buku yang berkaitan dengan pertanian; d) dana/pembiayaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pertanian sebagai penunjang bagi penyuluh untuk keperluan dan pelaksanaan tugas atau kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian. Adanya sarana dan prasarana yang memadai digunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien. Standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan pada tingkat kecamatan:

1) Sarana

- a) Pusat informasi: perlengkapan komputer dan jaringan internet, display, kamera digital, handycam, telepon
- b) Alat bantu penyuluhan: overhead projector, LCD projector, sound sistem, TV/DVD, papan tulis
- c) Peralatan administrasi: printer, kalkulator, rak buku
- d) Alat transportasi: kendaraan operasional roda dua
- e) Mebel : meja, kursi, lemari buku, peralatan dapur.

2) Prasarana

Bangunan gedung, sumber air bersih, penerangan (PLN/genset), jalan lingkungan, dan lahan percontohan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi peranan suatu lembaga pertanian dalam memberikan pelatihan kepada petani yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Bahua (2015) menjelaskan bahwa kurangnya kemampuan penyuluh/fasilitator dapat disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang

ada untuk menjangkau petani. Upaya perubahan usahatani yang disampaikan oleh penyuluh/fasilitator kepada petani bergantung pada ketersediaan sarana dalam hal jumlah, mutu, dan waktu yang tepat. Jika sarana ini tersedia, maka keberhasilan penyuluh/fasilitator akan tercapai.

Lebih lanjut, Larasati dkk. (2015) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelatihan/penyuluhan dan peranan penyuluh/fasilitator, diperlukan sarana dan prasarana pendampingan yang memadai agar penyuluhan dan pelatihan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada dapat memberikan kelancaran dalam proses pendampingan bagi kelompok tani.

4) Manajemen Lembaga

Manajemen merupakan suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Hal ini menekankan pada fungsi yang melekat pada manajemen yang harus dijalankan dalam pencapaian tujuan sebuah lembaga serta adanya gagasan bahwa untuk mencapai tujuan melalui fungsi tersebut tidak lain melalui pemanfaatan sumber daya dalam lembaga. Rohman (2017), mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumberdaya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (suatu yang harus dicapai) atau tujuan kerja yang tertentu.

Manajemen lembaga diukur dalam hal perencanaan kegiatan dan prosedur yang ada untuk pemantauan dan koordinasi. Mursalahuddin dkk. (2019) bahwa manajemen kinerja penyuluh pertanian dibagi menjadi tiga yakni persiapan (perencanaan), pelaksanaan, dan evaluasi. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi yakni apakah ada perubahan terkait pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani, bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia, apakah ada kesesuaian metode yang digunakan selama kegiatan

penyuluhan. Fungsi manajemen lembaga menurut Rohman (2017) adalah sebagai berikut:

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan lembaga. Kegiatan perencanaan ini termasuk juga membuat keputusan mengenai sasaran, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, penunjukan tanggungjawab dan pengaturan kegiatan-kegiatan.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang dan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan. Proses pengawasan dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian.
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai.
- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
- d. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.
- e. Meninjau dan menganalisis ulang rencana, apakah sudah realistis atau tidak. Jika ternyata belum realistis maka perlu diperbaiki.

5) Karakteristik petani binaan

Bahua (2010) mengemukakan bahwa karakteristik individu merupakan personal faktor yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan lingkungan yang meliputi: umur, pendidikan, dan karakteristik psikologis. Karakteristik psikologis yaitu adanya rasionalitas, fleksibilitas mental, orientasi pada usahatani sebagai bisnisnya, dan kemudahan menerima inovasi/teknologi. Karakteristik individu dapat dipengaruhi oleh perilaku, lingkungan, dan individu yang saling berinteraksi. Organisasi dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dalam mencapai visi dan misinya secara berkelanjutan tergantung pada kualitas sumberdaya manusianya (SDM). SDM yang berkualitas adalah SDM yang minimal memiliki empat karakteristik, yaitu: (1) *competency (knowledge, skill, abilities dan experience)* yang memadai; (2) *commitment* pada organisasi; (3) selalu bertindak *cost-effectiveness* pada setiap aktivitasnya dan (4) *congruence of goals* yaitu bertindak selaras antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Karakteristik petani terdiri dari: umur, pendidikan formal, dan pengalaman kerja.

6) Sistem Penghargaan

Pengakuan keberhasilan ditunjukkan dengan adanya pemberian penghargaan atas prestasi keberhasilan yang pernah diraih. Menurut Marius dkk. (2007), adanya penghargaan yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat terhadap penyuluh menempatkan seseorang sebagai figur yang populer, terbuka terhadap berbagai ide, berinteraksi dengan petani dan lembaga atau orang lain yang terkait demi kemajuan pertanian. Organisasi yang menggunakan penghargaan dan sanksi dalam sistem manajemennya dapat meningkatkan kinerja organisasi lebih dari 60% (NAO, 2008). Adanya pengakuan akan keberhasilan yang pernah dicapai akan memotivasi penyuluh untuk lebih meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga peran yang dimainkan akan tinggi pula.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu mengenai peranan lembaga pertanian terhadap pemberdayaan petani disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu

No	Penulis, tahun	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Setiawan dkk., 2016	Peran Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) dalam Pengembangan Pemuda Pedesaan (Studi Kasus di P4S Tani Mandiri Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat)	Penelitian didesain secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus, kemudian dianalisis secara deskriptif.	P4S Tani Mandiri berperan dalam memberdayakan pemuda pengangguran, memberdayakan anak-anak petani, mengembangkan agribisnis dan menginisiasi usaha-usaha alternatif. Keberdayaan yang terjadi pada peserta pelatihan yaitu mereka dapat memenuhi kebutuhannya melalui usaha tani, menjadi <i>supplier</i> , bekerja dibidang jasa, dll.
2	Solihin dkk., 2019	Kinerja Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya Berbasis Pesantren di Jawa Barat	Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei, kemudian dianalisis secara deskriptif.	Peran P4S berbasis pesantren di Jawa Barat berada pada kategori tinggi yaitu berperan dalam penyuluhan dan berada pada kategori sedang pada peran pelatihan, regenerasi petani, diseminasi teknologi, dan pengembangan jejaring. Kurang optimalnya P4S dalam menjalankan perannya disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah keterbatasan instruktur, fasilitator, kesiapan kurikulum, modul, kekhasan pelatihan P4S, dan sarana prasarana yang belum memadai.
3	Yeni dkk., 2019	Peranan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) dalam Pemberdayaan Petani Di	Metode survei, kemudian pengolahan dan analisis data secara deskriptif, tabulasi, dan	Peranan P4S dalam memberdayakan petani di Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam klasifikasi sedang. Indikator peranan P4S yaitu: 1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

Tabel 5. Lanjutan ringkasan penelitian terdahulu

No	Penulis, tahun	Judul	Metode	Kesimpulan
		Kabupaten Lampung Tengah	statistik non parametric dengan analisis korelasi rank spearman.	2) Menyebarkan informasi pertanian 3) Mengembangkan model percontohan usahatani 4) Membantu penyuluh dalam diseminasi teknologi 5) Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian 6) Menumbuhkembangkan jejaring kerja. Faktor yang mempengaruhi peranan P4S dalam memberdayakan petani yaitu ketersediaan sarana prasarana dan jumlah petani binaan.
4	Sapar dkk., 2011	Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Kompetensi Petani Kakao di Empat Wilayah Sulawesi Selatan	Metode survey kemudian analisis data menggunakan SEM (<i>Structural Equation Model</i>) dengan program LISREL (<i>Linear Structural Relationships</i>).	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian adalah : 1) Karakteristik (umur, pelatihan, pengalaman kerja) 2) Kompetensi (kemampuan perencanaan penyuluhan, kemampuan dalam evaluasi dan pelaporan, kemampuan dalam pengembangan penyuluhan) 3) motivasi (kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi), 4) Kemandirian (kemandirian ekonomi)
5	Syafruddin dkk., 2013	Kinerja Penyuluh Pertanian Berdasarkan Faktor Personal dan Situasional	Metode survey kemudian analisis data menggunakan path analysis (analisis jalur), dengan AMOS 16.0.	1) Faktor personal penyuluh, yaitu kemampuan penyuluh, motivasi penyuluh, tingkat pendidikan penyuluh, dan masa kerja penyuluh memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja penyuluh pertanian. 2) Faktor situasional (frekuensi pelatihan serta dukungan sarana dan prasarana) berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja penyuluh pertanian Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara melalui faktor personal penyuluh

Tabel 5. Lanjutan ringkasan penelitian terdahulu

No	Penulis, tahun	Judul	Motede	Kesimpulan
6	Lubis, 2015	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai	Pendekatan kuantitatif dengan skala likert, melalui survey kemudian dianalisis dengan uji regresi linear berganda	Kinerja penyuluh pertanian dipengaruhi oleh sistem penghargaan, ketersediaan sarana dan prasarana, komoditas dominan wilayah binaan.
7	Larasati dkk., 2015	Peran Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dalam Membantu Masyarakat Mendapatkan Izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah	Pendekatan kuantitatif dengan skala likert melalui sensus kemudian analisis data dengan uji Chi Square dan uji korelasi koefisien kontingensi untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel.	Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebagai pendamping memiliki peran yang tinggi dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan izin HKm di Kecamatan Sendang Agung dengan berperan sebagai dinamisator, mediator, fasilitator, motivator, dan edukator. <ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor internal yang berhubungan dengan peran pendamping adalah pendidikan non-formal, jumlah tanggungan keluarga, lama bertugas, dan kekosmopolitan. 2) Faktor eksternal yang berhubungan dengan peran pendamping adalah pengakuan keberhasilan dan intensitas supervisi.
8	Ragasa <i>et al.</i> , 2015	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluhan Pertanian: Bukti dari Republik Demokratik Kongo	Analisis deskriptif terhadap data sekunder dari survei Kepala/Pengawas/Pemeriksa di Organisasi Penyuluh Pertanian dan survei Teknisi/Pemantau Pertanian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluhan Pertanian <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata kelola dan lingkungan yang mendukung (Menciptakan sistem yang efektif agar penyuluh termotivasi untuk menjalankan perannya) 2) Kemitraan dan keterkaitan 3) Kapasitas organisasi, manajemen, dan pembelajaran (Pendanaan, jumlah penyuluh, sarana dan prasarana,

Tabel 5. Lanjutan ringkasan penelitian terdahulu

No	Penulis, tahun	Judul	Metode	Kesimpulan
9	Refiswal, 2018	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Langkat	Pendekatan kuantitatif melalui sensus, kemudian analisis data dengan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel.	pendidikan non formal) 4) Metode penyuluhan (Penyuluhan berbasis kelompok adalah cara yang efektif dan pendekatan campuran (metode penyampaian gabungan) bekerja lebih baik daripada pendekatan tunggal. Faktor pendidikan formal, pengalaman kerja, dan jarak wilayah kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh.
10	Mursalahuddin dkk., 2019	Manajemen Kinerja Penyuluhan pertanian Dinas pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu	Analisis Skala Likert's Summated Rating (SLR) dan analisis Nilai Prestasi Kerja (NPK)	Manajemen kinerja penyuluh pertanian pada Variabel perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berada pada kategori baik. Nilai prestasi kerja penyuluh pertanian dalam kategori baik.
11	Mekannon <i>et al.</i> , 2020	Memahami Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Penyuluhan Pertanian di Etopia	Metode survey kemudian data dianalisis dengan statistik deskriptif (frekuensi, mean, dan standar deviasi) dan model ekonometrika (regresi logistic biner)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga penyuluhan pertanian dan kinerja penyuluh 1) Struktur tata kelola dan lingkungan yang mendukung : sebab, lembaga yang berhasil yaitu memiliki visi, misi, dan target kinerja yang dapat diukur 2) Kemitraan dan kerjasama, sesuai dengan perspektif sistem inovasi pertanian untuk meningkatkan pengetahuan, inovasi, dan pembelajaran 3) Kapasitas organisasi, manajemen, dan pembelajaran; (jumlah, karakteristik, kompetensi, motivasi) penyuluh, sarana prasarana, sistem penghargaan dan sanksi berpengaruh terhadap kinerja 4) Metode penyuluhan berbasis pusat penyuluhan petani yaitu kunjungan ke kebun atau ke rumah petani, demo cara, pertemuan kelompok tani, pelatihan di lembaga penyuluhan/pelatihan, dan penggunaan TIK

2.3 Kerangka Pemikiran

Secara umum, sektor pertanian menjadi bidang usaha utama bagi penduduk yang bekerja yaitu sebesar 49 persen dari total penduduk di Lampung yang bekerja (BPS, 2022). Petani yang melakukan usahatani, tentunya perlu diimbangi dengan sumberdaya petani yang unggul sehingga akan menghasilkan kegiatan usahatani yang produktif, hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan petani merupakan proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004). Praktik pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat yang unggul dalam usahatani salah satunya melalui pembentukan lembaga pelatihan pertanian yang didirikan oleh masyarakat itu sendiri dan didampingi oleh penyuluh pegawai negeri sipil, yaitu Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Adanya P4S sebagai perwujudan kemandirian bidang pertanian yang di dalamnya terdapat sumberdaya petani yang profesional dan usahatani telah maju sehingga dapat dicontoh oleh petani lain melalui kegiatan yang dilakukan P4S yaitu pelatihan, permagangan, penyuluhan, dan pendampingan (Permentan, 2016). Pemberdayaan dilakukan dalam aspek kognitif, konatif, afektif, dan psikomotoriknya (Ife dan Frank, 2008).

Suharto (2021) menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan kultural dan politis. Ketiga indikator keberdayaan tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan seperti kekuasaan di dalam (*power within*) yaitu kemampuan untuk berubah, kekuasaan untuk (*power to*) yaitu kemampuan untuk memperoleh akses, kekuasaan atas (*power over*) yaitu kemampuan menghadapi hambatan, kekuasaan dengan (*power with*) yaitu kemampuan bekerjasama. Tingkat keberdayaan petani dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya kebijakan dari pemerintah, daya dukung lahan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Berdasarkan hal itu, dalam penelitian ini ingin mengkaji tingkat keberdayaan petani sebelum dibina dan setelah dibina oleh P4S yang dilihat dari peranan P4S dalam memberdayakan petani binaan dengan didukung faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap peranan P4S dalam memberdayakan petani binaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap peranan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam lembaga P4S seperti aspek kelembagaan dan kontribusi penyuluh, sedangkan faktor eksternal bersumber dari luar lembaga P4S.

Faktor internal berdasar kerangka kerja Birner *et al.* (2009) yaitu: (1) Sistem tata kelola lembaga, suatu lembaga dapat dikatakan berhasil apabila lembaga tersebut memiliki visi, misi, tujuan, dan target kinerja yang dapat diukur dengan jelas (Ragasa *et al.*, 2015); (2) Kerjasama dan kemitraan, adanya hubungan dan keterkaitan antar aktor seperti penyuluh dengan pemerintahan, peneliti, penyuluh lain, pemasok input pertanian, dan pelaku pasar sangat penting untuk kinerja lembaga agar peranannya dapat efektif dalam sistem penyuluhan pertanian (Ragasa *et al.*, 2015 dan Mekannon *et al.*, 2020); (3) Kapasitas lembaga, kapasitas lembaga mengacu pada kuantitas dan kualitas penyuluh serta ketersediaan sarana dan prasarana. Anderson dan Feder (2004) bahwa rasio jumlah penyuluh pemerintah dengan petani pada sebagian besar Negara berkembang adalah 1:1000, berdasarkan kebijakan departemen pertanian dalam revitalisasi penyuluhan di Indonesia diamanatkan bahwa satu penyuluh satu desa binaan yang diatur dalam wilayah kerja penyuluh pertanian. Pada sistem penyuluhan terdapat beberapa penyuluh dari berbagai sektor, seperti penyuluh pemerintah, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Jumlah penyuluh yang memadai akan berdampak pada kinerja lembaga (Mekannon *et al.*, 2020). Namun, terdapat kesenjangan antara jumlah penyuluh yang relatif besar dengan kompetensi teknis penyuluh yang relatif rendah (MoANR, 2017), sehingga tidak hanya jumlah penyuluh, melainkan kualitas penyuluh juga perlu diperhatikan.

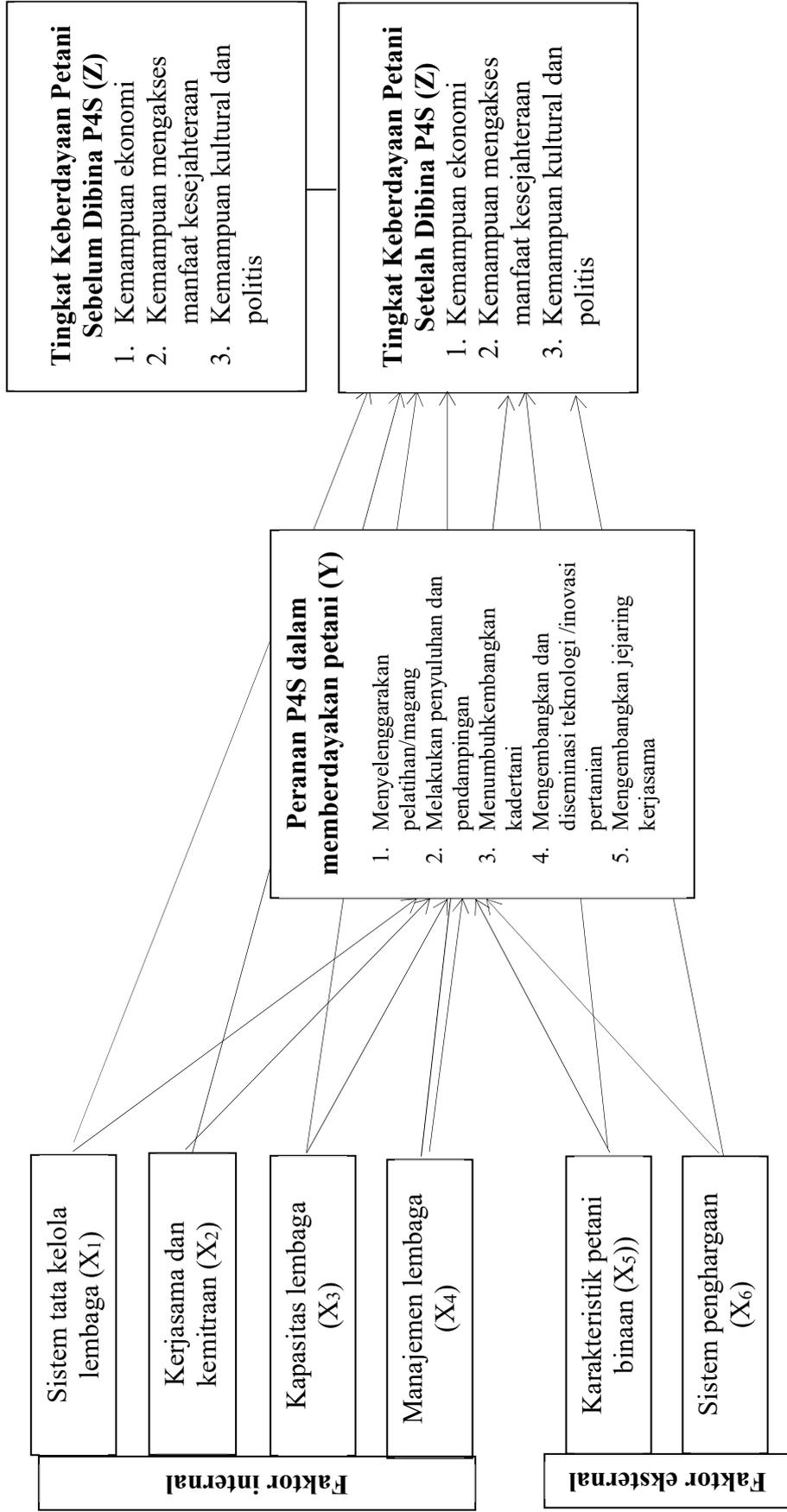
Kualitas penyuluh dapat dilihat dari kompetensi dan motivasinya. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kompetensi penyuluh berpengaruh terhadap kinerja (Bahua, 2010). Kinerja berhubungan dengan peranan karena kinerja yang baik maka orang tersebut telah menjalankan peranannya sesuai kedudukan/status (Marius dkk., 2007); Motivasi menggambarkan faktor pendorong penyuluh pertanian untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan dirinya.

Tingkat motivasi kerja berhubungan dengan tingkat peranan seseorang dalam suatu lembaga yang berdampak pula pada peranan lembaga tersebut dimasyarakat (Fadhilah, 2015). Ketersediaan sarana dan prasarana lembaga, Bahua (2015) menjelaskan bahwa upaya perubahan usahatani yang disampaikan oleh penyuluh kepada petani bergantung pada ketersediaan sarana dalam hal jumlah, mutu, dan waktu yang tepat. Hal ini sejalan dengan penelitian Syafruddin dkk. (2013); Lubis (2015); dan Yeni dkk. (2019) bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja penyuluh sehingga dapat meningkatkan peranannya; (4) Manajemen lembaga, Mursalahuddin dkk. (2019) menjelaskan bahwa manajemen kinerja penyuluh pertanian mencakup gaya kepemimpinan (*top down/ botton up*) dan prosedur yang ada seperti persiapan (perencanaan), pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sistem manajemen harus sesuai dengan tujuan sistem penyuluhan pertanian dan disesuaikan sistem tata kelola lembaga (Birner *et al.*, 2009). Manajemen lembaga berbasis kinerja yang buruk menjadi penyebab ketidakefektifan sistem penyuluhan pertanian (Ragasa *et al.*, 2015).

Faktor eksternal lembaga yang diduga berhubungan dengan peranan P4S meliputi: (5) Karakteristik petani terdiri dari: umur, pendidikan formal, lama melakukan usahatani, dan luas lahan. (6) Sistem penghargaan berupa pemberian penghargaan oleh pemerintah atas keberhasilan atau prestasi yang diraih oleh penyuluh. Adanya pengakuan keberhasilan yang pernah dicapai akan memotivasi penyuluh untuk lebih meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga peran yang dimainkan penyuluh akan tinggi pula. Hal ini sesuai dengan penelitian Larasati dkk.. (2015) dan Ragasa *et al.* (2015) bahwa sistem penghargaan berhubungan dengan tingkat peranan lembaga. Berdasarkan hal di atas, maka peranan P4S diduga berpengaruh dengan faktor yang mendukung seperti sistem tata kelola lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas lembaga, manajemen lembaga, karakteristik petani, dan sistem penghargaan yang juga akan berdampak pada tingkat keberdayaan petani binaan di Kabupaten Lampung Timur.

Peranan P4S dalam memberdayakan petani binaan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016

bahwa Peranan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya meliputi: (1) sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dan permagangan untuk Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain; (2) lembaga yang turut andil dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain; (3) lembaga yang turut menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat kader tani; (4) sentra dalam pengembangan dan diseminasi teknologi/inovasi, budidaya, perbenihan, pengolahan hasil, pengembangan spesifik lokalita; (5) dan sentra pengembangan jejaring Usaha Tani. Oleh sebab itu, peranan P4S dalam memberdayakan petani binaan yang diajukan dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran peranan P4S terhadap tingkat keberdayaan petani binaan di Kabupaten Lampung Timur dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peranan P4S dan tingkat keberdayaan petani.

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem tata kelola lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas lembaga, manajemen Lembaga, karakteristik petani binaan dan sistem penghargaan berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat keberdayaan petani binaan melalui peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur.
2. Diduga terdapat perbedaan tingkat keberdayaan petani sebelum dan setelah dibina oleh P4S di Kabupaten Lampung Timur.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional merupakan pengertian yang digunakan untuk mendapatkan serta menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap peranan P4S dalam pemberdayaan petani (variabel X), peranan P4S didefinisikan sebagai variabel Y, serta tingkat keberdayaan petani binaan didefinisikan sebagai variabel Z.

3.1.1 Variabel (X)

Faktor yang diduga berpengaruh terhadap peranan P4S dan tingkat keberdayaan petani binaan sebagai variabel X yaitu sebagai berikut:

1) Sistem tata kelola lembaga (X_1)

Sistem tata kelola lembaga merupakan pengaturan kelembagaan terkait proses dan struktur (mekanisme) lembaga. Proses digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas yang direncanakan, sedangkan struktur untuk menspesifikkan hak dan dan tanggungjawab pemangku kepentingan.

2) Kerjasama dan kemitraan (X_2)

Kemitraan yaitu kerjasama yang dilakukan dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan berbagai pihak yang bekerjasama.

3) Kapasitas lembaga (X_3)

Kapasitas lembaga mencakup sumberdaya yang ada di dalamnya yang mengacu pada kuantitas dan kualitasnya yang meliputi: jumlah penyuluh,

swadaya, kompetensi penyuluh swadaya, motivasi penyuluh swadaya, sarana dan prasarana

4) Manajemen lembaga (X_4)

Manajemen merupakan suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran lembaga melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

5) Karakteristik petani binaan (X_5)

Karakteristik petani binaan terdiri dari umur, tingkat Pendidikan formal, lama melakukan usahatani, dan luas lahan.

6) Sistem penghargaan (X_6)

Sistem penghargaan merupakan imbalan atau ganjaran yang diberikan pemerintah kepada penyuluh P4S berupa *reward* dan *punishment*. Pemberian *reward* dari pemerintah berupa sertifikat penghargaan, sedangkan pemberian *punishment* dari pemerintah berupa surat peringatan/teguran.

3.1.2 Variabel (Y)

Peranan adalah seluruh pola kebudayaan yang dihubungkan dengan kedudukan tertentu, mencakup sikap, nilai, perilaku yang ditentukan oleh masyarakat terhadap anggotanya yang berada pada posisi tertentu. Peranan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya P4S (Y) adalah suatu sikap, nilai, dan perilaku suatu lembaga penyuluhan dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan sikap positif petani baik dari segi kepemimpinan, kemandirian, maupun penerapan teknologi. Indikator peranan P4S berdasar Permentan (2016) yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani

Pengukuran ini dilakukan terkait bagaimana penyuluh P4S mengajar dan mendidik petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan/permagangan yang diberikan P4S, serta cara yang digunakan

penyuluh P4S dalam memperkenalkan teknologi tepat guna bagi petani yang berorientasi agribisnis dan berbasis kearifan lokal.

2. Melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada petani
Penyuluhan dan pendampingan untuk membantu petani dalam mengadopsi dan menerapkan inovasi yang ditawarkan melalui percontohan usahatani.
3. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperkuat kader tani
Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani agar menjadi suatu wadah organisasi yang kuat untuk mengembangkan usahatani.
4. Mengembangkan dan diseminasi teknologi/inovasi kepada petani
Kemampuan penyuluh P4S dalam menyampaikan informasi yang berorientasi agribisnis kepada petani dan pelaku usaha pertanian di pedesaan, memfasilitasi penggunaan media informasi seperti majalah tani, membentuk jaringan komunikasi antar petani, dan penggunaan internet, serta membimbing penerapan teknologi kepada petani dengan metode belajar melalui bekerja, baik kepada petani binaan, tani mitra, dan peserta pelatihan.
5. Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama
Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan usaha dan peluang kerjasama atau kemitraan yang dilakukan P4S dengan berbagai sumber-sumber teknologi, pemasaran, dan permodalan dalam rangka pelayanan informasi, konsultasi, dan fasilitasi pemenuhan kebutuhan petani di wilayah pedesaan. Indikatornya adalah bagaimana upaya penyuluh P4S membantu melatih petaninya dalam mengembangkan usahatannya dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain.

3.1.3 Variabel (Z)

Tingkat keberdayaan petani sebelum dan setelah dibina oleh P4S di Kabupaten Lampung Timur (Z) dapat dilihat dari keberdayaan petani yang menyangkut:

1. Kemampuan ekonomi,
2. Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan,
3. Kemampuan kultural dan politis.

Ketiga indikator keberdayaan tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan di dalam (*power within*): meningkatkan kesadaran untuk berubah
- 2) Kekuasaan untuk (*power to*): meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses
- 3) Kekuasaan atas (*power over*): perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan tersebut
- 4) Kekuasaan dengan (*power with*): meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat, dan makro (Suharto, 2021).

Pengukuran variabel X (sistem tata Kelola Lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas Lembaga, manajemen Lembaga, karakteristik petani binaan, dan sistem pengahrgaan), variabel Y peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur, dan variabel Z tingkat keberdayaan petani binaan P4S di Kabupaten Lampung Timur dalam penelitian ini yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengukuran variabel X

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Ukuran
Faktor Internal						
1	Sistem tata kelola Lembaga	Pengaturan kelembagaan terkait proses dan struktur (mekanisme)	Sistem pengelolaan lembaga	Perumusan visi, misi, dan kebijakan	<p>Penyuluh merumuskan visi yang didefinisikan dengan jelas dan secara umum anggota mengetahui</p> <p>Penyuluh merumuskan misi yang didefinisikan dengan jelas dan secara umum anggota mengetahui</p> <p>Penyuluh merumuskan kebijakan yang didefinisikan dengan jelas dan secara umum anggota mengetahui</p>	<p>(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu</p> <p>(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu</p> <p>(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu</p>
				Perumusan target kinerja	<p>Penyuluh merumuskan target kinerja yang mengikuti pedoman penyelenggaraan Lembaga swadaya berdasar Permentan No.33 tahun 2016</p> <p>Penyuluh merumuskan target kinerja yang mampu menjaga Lembaga untuk tetap berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja</p> <p>Penyuluh merumuskan target kinerja yang mampu mengukur hasil kinerja</p>	<p>(3) mengikuti (2) cukup mengikuti (1) kurang mengikuti</p> <p>(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu</p> <p>(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu</p>
				Pembuatan struktur lembaga	Struktur lembaga yang mengikuti Permentan No. 33 Tahun 2016 tentang pedoman pembinaan Lembaga	(3) mengikuti (2) cukup mengikuti (1) kurang mengikuti
				Pembagian tugas dan fungsi	Pembagian tugas dan fungsi dalam pembuatan struktur Lembaga	(3) ada, tertulis, lengkap (2) ada, tertulis,

Tabel 6. Lanjutan pengukuran variabel X

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Ukuran
Faktor Internal						
2	Kerjasama dan kemitraan	Kerjasama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama	Kerjasama dengan berbagai aktor	Bentuk kerjasama	Melakukan kerjasama dengan lembaga penyuluhan pemerintah, peneliti/ perguruan tinggi, organisasi desa, pemasok input pertanian, pelaku pasar, penyuluh swasta	Kurang lengkap (3) tidak ada kali
3	Kapasitas Lembaga	Kapasitas lembaga mencakup sumber daya yang ada di dalamnya yang mengacu pada kuantitas dan kualitasnya.	1. Jumlah penyuluh swadaya		Diukur berdasar satuan orang dari total penyuluh P4S orang
			2. Kompetensi penyuluh swadaya	Kemampuan melaksanakan aksi sosial	Kemampuan mengidentifikasi dan memonitor isu penting bagi vitalitas masyarakat	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu

Tabel 6. Lanjutan pengukuran variabel X

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Ukuran
Faktor Internal						
				Kemampuan mengapresiasi keragaman budaya	Kemampuan untuk mengapresiasi keragaman budaya, kesadaran, komitmen, dan kemampuan untuk rasa memiliki	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
				Kemampuan mengelola informasi teknologi pertanian	Keterampilan berkomunikasi (lisan dan tulisan), penerapan teknologi dan metode pengantar untuk mendukung program dan memandu perubahan perilaku	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
				Kemampuan membangun hubungan interpersonal	Kemampuan interaksi dengan individu dan kelompok-kelompok yang berbeda untuk menciptakan kerjasama	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
				Kemampuan kepemimpinan	Kemampuan analisis dan mengambil keputusan, memotivasi, komunikasi dan mendengarkan, fasilitasi, inovasi, menciptakan iklim kerja yang positif, tanggungjawab, mendelegasikan tugas dan wewenang	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
				Kemampuan menumbuhkembangkan kelompok tani	Kemampuan penyuluh dalam meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani berdasar (PAKEMPOKTAN): kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan, pengendalian dan pelaporan, kepemimpinan	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu

Tabel 6. Lanjutan pengukuran variabel X

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Ukuran
Faktor Internal						
				Kemampuan bidang keahlian teknis	Kemampuan dalam budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, dan teknologi tepat guna	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
3.	Motivasi penyuluh swadaya		Motivasi dalam melakukan penyuluhan	Motivasi dalam melakukan penyuluhan	Keinginan penyuluh dalam rangka melaksanakan peranan	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
				Motivasi akan aktualisasi diri	Kebutuhan untuk mewujudkan segala kemampuan dan seringkali terlihat pada hal-hal yang sesuai untuk mencapai cita dan cita diri seseorang	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
4.	Ketersediaan sarana dan prasarana		Sarana penyuluhan: computer, telp/hp, LCD proyektor, leaflet, brosur, buku, internet, meja, kursi, kendaraan		Jumlah sarana	(3) memadai (2) cukup memadai (1) kurang memadai
					Fungsi sarana	(3) baik (2) cukup baik (1) kurang baik
					Kualitas sarana	(3) layak (2) cukup layak (1) kurang layak
				Prasarana penyuluhan	Jumlah prasarana	(3) memadai (2) cukup memadai (1) kurang memadai

Tabel 6. Lanjutan pengukuran variabel X

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Ukuran
Faktor Internal						
4	Manajemen Lembaga	Proses khusus meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran lembaga melalui pemanfaatan sumber daya.	1. <i>Planning</i> (Perencanaan)	ruang pelatihan, lahan demplot, penerangan (PLN/genset), dana/ pembiayaan	Fungsi prasarana	(3) baik (2) cukup baik (1) kurang baik
					kualitas prasarana	(3) layak (2) cukup layak (1) kurang layak
				Analisis kebutuhan	Melakukan analisis kebutuhan sebelum pelatihan	(3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan
				Penetapan tujuan	Melakukan penetapan tujuan pelatihan	(3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan
				Penetapan sasaran	Melakukan penetapan sasaran pelatihan	(3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan
				Persiapan kebutuhan belajar	Melakukan persiapan untuk kebutuhan pengalaman belajar yang positif	(3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan
			2. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	Membentuk kepanitian sebelum melakukan pelatihan, struktur tugas ini dibagi berdasarkan kemampuan anggota	(3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan	

Tabel 6. Lanjutan pengukuran variabel X

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Ukuran
Faktor Internal						
			3. <i>Actuating</i> (Pelaksanaan)	Langkah persiapan	Persiapan administrative dan edukatif	(3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan
				Langkah pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan berupa pembukaan, pelaksanaan, penutupan kegiatan kali
				Langkah laporan	Melaksanakan kegiatan laporan	(3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan
			4. <i>Controlling</i> (pengawasan)	Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur berikut, meliputi: peserta, program pengajaran, personal, organisasi penyelenggara, pelatih, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan pasca diklat	(3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan
5	Karakteristik petani	Faktor internal dan eksternal petani	Umur		Diukur berdasar usia petani tahun
			Pendidikan formal		Tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan petani	SD SMP/SMA D1/S2
			Lama usahatani		Diukur berdasar lama usahatani Tahun
					Luas lahan yang digarap petaniHa

Tabel 6. Lanjutan pengukuran variabel X

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Ukuran
Faktor Internal						
6	Sistem penghargaan	Imbalan atau ganjaran oleh pemerintah kepada penyuluh P4S	1. Pemberian <i>Reward</i>	Pelaksanaan pemberian <i>reward</i> mencakup pemberi dan bentuk	Pemberian <i>reward</i> dari pemerintah berupa sertifikat penghargaan kali/ tahun
			2. Pemberian <i>punishment</i>	Pelaksanaan pemberian <i>punishment</i> mencakup pemberi dan bentuk <i>punishment</i>	Pemberian <i>punishment</i> dari pemerintah berupa surat peringatan kali/ tahun

Tabel 7. Pengukuran variabel Y

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Pengukuran	Ukuran
1.	Peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur	Peranan merupakan bagian tindakan yang dilakukan oleh penyuluh P4S sesuai dengan kedudukan dan fungsi dalam lembaga P4S	1. Melakukan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani	Frekuensi pelatihan dalam 1 tahun Frekuensi pelatihan lanjutan Menyusun kegiatan pelatihan dengan memperhatikan kebutuhan petani kali/ tahun kali/ tahun (3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan

Tabel 7. Lanjutan pengukuran variabel Y

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Pengukuran	Ukuran
				Sikap petani dalam menerima dan menerapkan perkembangan teknologi yang diajarkan penyuluh	(3) menerima (2) cukup menerima (1) kurang menerima
			2. Melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada petani	Mengenalkan dan mengembangkan contoh usahatani	(3) melakukan (2) kadang- kadang (1) tidak melakukan
				Membantu setiap usahatani yang dikembangkan petani	(3) membantu (2) cukup membantu (1) kurang k membantu
				Memfasilitasi dan memberikan contoh keterampilan khusus	(3) melakukan (2) kadang- kadang (1) tidak melakukan
				Memberikan informasi baru melalui studi banding dengan	(3) melakukan (2) kadang- kadang (1) tidak melakukan
				Keberhasilan petani dalam menerapkan usahatani yang dicontohkan	(3) berhasil (2) cukup berhasil (1) kurang berhasil
				Kemampuan penyuluh dalam memberikan masukan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
				Keterlibatan dan keaktifan penyuluh dalam membantu petani	(3) aktif (2) cukup aktif (1) kurang aktif

Tabel 7. Lanjutan pengukuran variabel Y

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Pengukuran	Ukuran
3.	Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperkuat kader tani		Membantu menumbuhkan kelompok tani		(3) membantu (2) cukup membantu (1) kurang membantu
			Membantu mengembangkan kelompok tani melalui pertemuan rutin		(3) membantu (2) cukup membantu (1) kurang membantu
			Melatih kepemimpinan melalui pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus		(3) melakukan (2) kadang- kadang (1) tidak melakukan
			Membantu meningkatkan kemampuan kelompok tani berdasar PAKEMPOKTAN		(3) membantu (2) cukup membantu (1) kurang membantu
			Memberdayakan petani dengan mengembangkan usahataniya		(3) melakukan (2) kadang- kadang (1) tidak melakukan
			Melatih kemandirian petani dalam mengatasi masalah, baik dari segi modal, sarana produksi, teknologi, dan pemasaran		(3) melakukan (2) kadang- kadang (1) tidak melakukan
			4.	Mengembangkan dan diseminasi teknologi/ inovasi	
Menyebarkan informasi teknologi	 kali/tahun			

Tabel 7. Lanjutan pengukuran variabel Y

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Pengukuran	Ukuran
				Memfasilitasi penggunaan media informasi	(3) memfasilitasi (2) cukup memfasilitasi (1) kurang memfasilitasi
				Membantu membentuk jaringan komunikasi antar petani	(3) membantu (2) cukup membantu (1) kurang membantu
				Melakukan kegiatan bimbingan dan praktik lapang	(3) melakukan (2) kadang-kadang (1) tidak melakukan
				Melakukan pengamatan langsung setelah memberi pelatihan	(3) melakukan (2) kadang- kadang (1) tidak melakukan
				Memenuhi kebutuhan usahatani dalam bentuk suatu informasi	(3) memenuhi (2) cukup memenuhi (1) kurang memenuhi
				Keterlibatan dan keaktifan penyuluh dalam membantu petani	(3) melakukan (2) kadang- kadang (1) tidak
			5. Menumbuh kembangkan jejaring kerjasama	Keaktifan penyuluh dalam membantu petani menjalin kerjasama dengan lembaga lain	(3) aktif (2) cukup aktif (1) kurang aktif
				Keberhasilan penyuluh dalam mengembangkan skala usahatani	(3) berhasil (2) cukup berhasil (1) kurang berhasil

Tabel 8. Pengukuran variabel Z

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
1.	Tingkat keberdayaan petani	Tingkat keberdayaan petani adalah daya kemampuan yang dimiliki guna mengetahui, mengidentifikasi, mengendalikan dan memutuskan apa yang menjadi kebutuhan demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi	1. Kemampuan ekonomi	<p>1. Kekuasaan di dalam (<i>power within</i>): peningkatan kesadaran dan keinginan untuk berubah</p> <p>2. Kekuasaan untuk (<i>power to</i>): peningkatan kemampuan individu untuk berubah dan peningkatan kesempatan untuk memperoleh akses</p>	<p>1) Mampu melaksanakan evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi</p> <p>2) Adanya keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara</p> <p>3) Adanya keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat</p> <p>1) Memiliki akses terhadap pelayanan keuangan mikro</p> <p>2) Memiliki akses terhadap pendapatan</p> <p>3) Memiliki akses terhadap asset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga</p> <p>4) Memiliki akses terhadap pasar</p>	<p>(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu</p> <p>(3) tinggi (2) sedang (1) rendah</p>

Tabel 8. Lanjutan pengukuran variabel Z

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
				3. Kekuasaan atas	1) Memiliki kontrol atas penggunaan pinjaman, tabungan	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
				(<i>power over</i>): perubahan pada hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat, dan makro; kekuasaan atau tindakan untuk menghadapi hambatan	2) Memiliki kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
					3) Memiliki kontrol atas asset produktif dan kepemilikan keluarga	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
					4) Memiliki kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
					5) Mampu melakukan tindakan terhadap diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
				4. Kekuasaan dengan (<i>power with</i>): peningkatan solidaritas dan tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan	1) Mampu bertindak sebagai <i>role model</i> dalam pekerjaan publik dan modern	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
					2) Mampu bertindak bersama menghadapi diskriminasi terhadap sumber (hak atas tanah), pasar, dan gender pada konteks ekonomi makro	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu

Tabel 8. Lanjutan pengukuran variabel Z

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
			2. Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan	1. Kekuasaan di dalam (<i>power within</i>)	1) Memiliki kepercayaan diri dan kebahagiaan	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
					2) Adanya keinginan memiliki kesejahteraan yang setara	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
					3) Adanya keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
					4) Adanya keinginan untuk mengontrol jumlah anak	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
				2. Kekuasaan untuk (<i>power to</i>)	1) Memiliki kemampuan melek huruf	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
					2) Mampu memenuhi kecukupan gizi untuk hidup sehat	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
					3) Memiliki kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah

Tabel 8. Lanjutan pengukuran variabel Z

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
				3. Kekuasaan atas (<i>power over</i>)	1) Memiliki kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan keputusan keluarga berencana	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
					2) Mampu melakukan tindakan untuk mempertahankan diri terhadap kekerasan keluarga dan masyarakat	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
				4. Kekuasaan dengan (<i>power with</i>)	Mampu melakukan tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
		Kemampuan kultural dan politis		1. Kekuasaan di dalam (<i>power within</i>)	1) Mampu percaya diri dan mampu menyampaikan pendapat	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
					2) Memiliki keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
					3) Memiliki keinginan terlibat dalam proses budaya, hukum, dan politik	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah
				2. Kekuasaan untuk (<i>power to</i>)	1) Memiliki kebebasan mobilitas	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah

Tabel 8. Lanjutan pengukuran variabel Z

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sub indikator	Pengukuran	Kategori
					2) Memiliki pengetahuan mengenai proses hukum, politik, dan kebudayaan	(3) tahu (2) cukup tahu (1) kurang tahu
					3) Mampu menyelesaikan masalah akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
			3. Kekuasaan atas (<i>power over</i>)		1) Mampu bertindak dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
					2) Mampu terlibat dalam pengambilan peran pada proses budaya, politik, dan kebudayaan	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
			4. Kekuasaan dengan (<i>power with</i>)		1) Mampu meningkatkan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat terjadi masalah	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
					2) Mampu melakukan tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat	(3) mampu (2) cukup mampu (1) kurang mampu
					3) Berpartisipasi dalam gerakan menghadapi subordinasi gender	(3) tinggi (2) sedang (1) rendah

Banyaknya kelas dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja, yakni sebanyak tiga kelas. Hal ini berdasarkan pertimbangan untuk memudahkan pengklasifikasian atau berdasarkan kepraktisan semata-mata (Dajan, 1986). Penentuan jarak antar kelas atau besarnya interval kelas pada setiap variabel dalam penelitian ini mengacu pada rumus Sturges sebagai berikut:

$$Z = \frac{X - Y}{k}$$

Keterangan :

- Z = Interval kelas atau kategori
- X = Nilai skor tertinggi
- Y = Nilai skor terendah
- k = Banyaknya kelas atau kategori

3.2 Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022. Tempat penelitian yaitu pada lembaga P4S yang ada di Kabupaten Lampung Timur, meliputi: P4S Bumi Alam Purba di Kecamatan Raman Utara, P4S Baitu Cocoa di Kecamatan Sekampung udik, P4S Tyto Maju di Kecamatan Purbolinggo, P4S Agro Mulyo Lestari di Kecamatan Marga Sekampung, dan P4S Tani's Market Balerejo di Kecamatan Batanghari, serta P4S Maju Bersama di Kecamatan Pekalongan. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Timur memiliki jumlah P4S terbanyak dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Provinsi Lampung.

3.3 Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini yaitu petani binaan P4S. Penentuan jumlah petani sampel menggunakan rumus Yamane (Rahmat, 2004) :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
 N = Jumlah populasi
 d = Tingkat presisi (10%)

Perhitungan jumlah sampel petani binaan secara keseluruhan pada P4S

$$n = \frac{240}{240(0.1)^2 + 1} = 70 \text{ orang}$$

Jumlah sampel petani binaan dalam tiap-tiap lembaga P4S ditentukan

menggunakan rumus alokasi proportional (Nazir, 1988) yaitu:

$$n_h = \frac{N_h}{N} \times n \quad \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- n_h = Jumlah sampel di wilayah binaan P4S
 N_h = Jumlah populasi di wilayah binaan P4S
 n = Jumlah sampel secara keseluruhan
 N = Jumlah populasi secara keseluruhan

Tabel 9. Jumlah petani binaan P4S di Kabupaten Lampung Timur

No	Nama P4S	Jumlah petani binaan	Jumlah sampel petani binaan
1	Bumi Alam Purba	20	6
2	Tyto Maju	36	10
3	Baitu Cocoa	58	17
4	Agro Mulyo Lestari	51	15
5	Tani's Market Balerejo	41	12
6	Maju Bersama	34	10
	Total	240	70

3.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan keterangan secara faktual dari sampel atau sebagian dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data penelitian. Jenis data pada penelitian adalah data primer.

3.5 Pengukuran Kesahihan dan Keterandalan Kuesioner Penelitian

1) Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur menunjukkan hasil pengukuran sesuai dengan definisinya. Suatu alat ukur dikatakan valid, apabila alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur secara tepat konsep yang sebenarnya ingin diukur. Uji validitas ini bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pernyataan dinyatakan valid atau layak apabila nilai r hitung $>$ r tabel (Yusup, 2018). Jumlah sampel untuk uji validitas sebanyak 20 petani binaan P4S di Kabupaten Lampung Timur. Hasil uji coba instrumen bahwa nilai koefisien *product moment* berkisar dari 0,387 sampai 1,000 lebih besar dari nilai r tabel = 0,380 artinya seluruh instrumen atau item pertanyaan dalam pengukuran dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkain alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan berulang. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu konstrukstur atau variabel dikatakan reliabel, jika memiliki nilai *alpha cronbach* $\geq 0,70$ (Yusup, 2018). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian

No	Variabel	Nilai Alpha Cronbach's	Keputusan
1	Faktor yang diduga berpengaruh terhadap peranan P4S (X)	0.739	Reliabel
2	Peranan P4S dalam memberdayakan petani (Y)	0.749	Reliabel
3	Tingkat keberdayaan petani binaan (Z)	0.750	Reliabel

Tabel 10 menunjukkan bahwa instrumen penelitian pada variabel X, variabel Y, variabel Z memiliki nilai *Alpha Cronbach's* $\geq 0,70$ dapat diartikan bahwa semua instrumen penelitian pada semua variabel faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap peranan P4S (X), Peranan P4S (Y), dan tingkat keberdayaan petani binaan (Z) yaitu reliabel sehingga dapat digunakan pada penelitian ini.

3.6 Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, analisis jalur PLS, dan uji beda. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur dan tingkat keberdayaan petani binaan. Metode ini memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data primer yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Analisis jalur PLS digunakan untuk mengetahui apakah faktor internal dan eksternal P4S berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat keberdayaan petani binaan. Uji beda (*paired sample t-test*) digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat keberdayaan petani sebelum dan setelah dibina oleh P4S di Kabupaten Lampung Timur.

1) Analisis Deskriptif Kuantitatif

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur dan tingkat keberdayaan petani binaan (Sarwono, 2018). Pengukuran peranan P4S dalam memberdayakan petani (Y) mencakup beberapa indikator, (1) Melakukan pelatihan/magang kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani; (2) Melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada petani untuk membantu petani dalam mengadopsi dan menerapkan inovasi yang ditawarkan saat pelatihan melalui percontohan usahatani; (3) Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperkuat kader tani; (4) Mengembangkan dan diseminasi teknologi/inovasi kepada petani; (5) Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama (Permentan No. 33 tahun 2016).

2) Analisis Jalur PLS

Analisis jalur dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung faktor internal dan eksternal P4S terhadap tingkat keberdayaan petani binaan. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan

sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, melainkan juga secara tidak langsung (Sarwono, 2011).

SEM merupakan suatu metode analisis statistik multivariat pengembangan dari regresi. Para ahli metode penelitian mengelompokkan model persamaan struktural atau *Structural Equation Modelling* (SEM) menjadi dua pendekatan. Pertama disebut sebagai *Covariance Base SEM* (CB-SEM) dan kedua disebut sebagai *Variance Base SEM* (VB-SEM) atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Squares* (PLS). Analisa dengan menggunakan CB-SEM adalah dengan software AMOS, LISREL, sedangkan untuk VB-SEM atau (PLS) adalah software SmartPLS, WarpPLS dan XLStat. Penggunaan analisis SEM berbasis kovariat semacam Lisrel dan AMOS, menuntut berbagai macam persyaratan yang sangat ketat mulai dari kecukupan jumlah sampel, skala pengukuran data, model fit, dan pemenuhan asumsi lain seperti normality, linearity, dan multikolinearity, sedangkan pada analisis SEM berbasis *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis *powerfull* dan disebut juga sebagai *soft modeling* karena meniadakan asumsi-asumsi *Ordinary Least Square* (OLS) regresi. Pada penelitian ini menggunakan program SmartPLS karena memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

- 1) SmartPLS atau *Smart Partial Least Square* adalah software statistik yang sama tujuannya dengan Lisrel dan AMOS yaitu untuk menguji hubungan antara variabel;
- 2) Pendekatan smartPLS dianggap *powerfull* karena tidak mendasarkan pada berbagai asumsi.
- 3) Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam analisis relatif kecil. Penggunaan Smart PLS sangat dianjurkan ketika memiliki keterbatasan jumlah sampel sementara model yang dibangun kompleks. Hal ini tidak dapat dilakukan ketika kita menggunakan kedua software Lisrel dan AMOS yang membutuhkan kecukupan sampel;
- 4) Data dalam analisis smartPLS tidak harus memiliki distribusi normal karena SmartPLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak. Oleh karena itu, asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS;

- 5) SmartPLS mampu menguji model SEM formatif dan reflektif dengan skala pengukuran indikator berbeda dalam satu model. Apapun bentuk skalanya (rasio, kategori, likert, dan lain-lain) dapat diuji dalam satu model.

Model analisis jalur dalam PLS terdiri dari tiga tahap yaitu *outer model* yang menspesifikkan hubungan antara variabel dengan indikator, *inner model* digunakan untuk menspesifikkan hubungan antar variabel, dan tahap pengujian hipotesis. Berikut disajikan tahap-tahap analisis jalur (PLS) dengan bantuan program SmartPLS3.

A. *Outer Model* (Model Pengukuran)

Kriteria untuk pengukuran *outer model* yaitu validitas konvergen dengan melihat nilai outer loading, apabila nilai outer loading 0,5-0,6 dianggap cukup memadai (Ghozali dan Hengky, 2014). Validitas instrumen juga dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE), apabila nilai AVE lebih dari 0,05 maka instrumen dikatakan valid. Perhitungan untuk menguji reliabilitas indikator-indikator pembentuk variabel yaitu dengan melihat nilai *Cronbach alpha*.

B. *Inner Model* (Model Struktural)

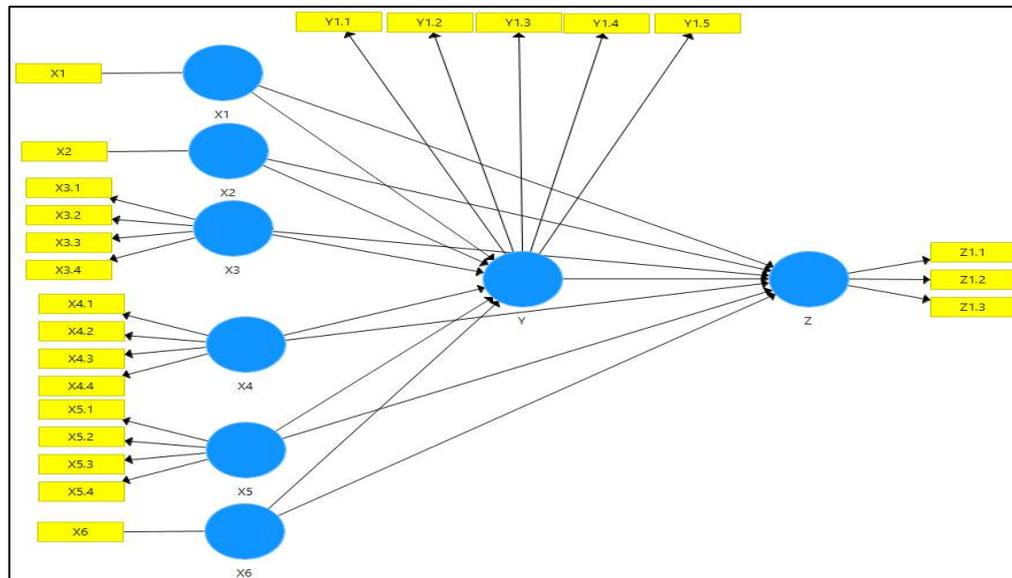
Kriteria pengujian pada model struktural yaitu melihat nilai R^2 untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel sistem tata kelola Lembaga (X_1), kerjasama dan kemitraan (X_2), kapasitas Lembaga (X_3), manajemen Lembaga (X_4), karakteristik petani binaan (X_5), dan sistem penghargaan (X_6) terhadap peranan P4S (Y).

Model substruktural 2 untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel sistem tata kelola Lembaga (X_1), kerjasama dan kemitraan (X_2), kapasitas Lembaga (X_3), manajemen Lembaga (X_4), karakteristik petani binaan (X_5), sistem penghargaan (X_6), dan peranan P4S (Y) terhadap tingkat keberdayaan petani binaan (Z). Selain menguji nilai R^2 , pada tahap ini juga menguji *Collinearity Statistic* (VIF) untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang kuat antar variabel independen (interkorelasi). Model struktural yang baik bila tidak terjadi interkorelasi.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan melihat output dengan bantuan program aplikasi SmartPLS3. Jika nilai sign. $< 0,05$ maka Hipotesis nol ditolak atau H_a diterima,

(Koefisien regresi signifikan). Pengukuran persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R-square (R^2) antara 1 dan nol (Muhson, 2022). Model persamaan struktural dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram jalur penelitian

Keterangan :

- X_1 = Sistem tata kelola lembaga
- X_2 = Kerjasama dan kemitraan
- X_3 = Kapasitas lembaga
- X_4 = Manajemen lembaga
- X_5 = Karakteristik petani
- X_6 = Sistem penghargaan
- Y = Peranan P4S dalam memberdayakan petani
- Z = Tingkat keberdayaan petani binaan
- $\rho_{Y X_1}$ = Koefisien jalur sistem tata kelola lembaga terhadap peranan P4S
- $\rho_{Y X_2}$ = Koefisien jalur kerjasama dan kemitraan terhadap peranan P4S
- $\rho_{Y X_3}$ = Koefisien jalur kapasitas lembaga terhadap peranan P4S
- $\rho_{Y X_4}$ = Koefisien jalur manajemen lembaga terhadap peranan P4S
- $\rho_{Y X_5}$ = Koefisien jalur karakteristik petani terhadap peranan P4S
- $\rho_{Y X_6}$ = Koefisien jalur sistem penghargaan terhadap peranan P4S
- ε_1 = Galat/faktor lain yang mempengaruhi peranan P4S
- $\rho_{Z X_1}$ = Koefisien jalur sistem tata kelola lembaga terhadap tingkat keberdayaan petani binaan
- $\rho_{Z X_2}$ = Koefisien jalur kerjasama dan kemitraan terhadap tingkat keberdayaan petani binaan
- $\rho_{Z X_3}$ = Koefisien jalur kapasitas lembaga terhadap tingkat keberdayaan petani binaan

- $\rho Z X_4$ = Koefisien jalur manajemen lembaga terhadap tingkat keberdayaan petani binaan
- $\rho Z X_5$ = Koefisien jalur karakteristik petani terhadap tingkat keberdayaan petani binaan
- $\rho Z X_6$ = Koefisien jalur sistem penghargaan terhadap tingkat keberdayaan petani binaan
- ε_2 = Galat/faktor lain yang mempengaruhi tingkat keberdayaan petani binaan

Langkah kedua yaitu membuat persamaan strukturalnya dan interpretasi hasil:

$$Y = \rho YX_1 + \rho YX_2 + \rho YX_3 + \rho YX_4 + \rho YX_5 + \rho YX_6 + \varepsilon_1$$

$$Z = \rho ZX_1 + \rho ZX_2 + \rho ZX_3 + \rho ZX_4 + \rho ZX_5 + \rho ZX_6 + \rho ZY + \varepsilon_2$$

3) Uji beda rata-rata untuk dua sampel berpasangan (*paired sample t-test*)

Uji beda rata-rata dua sampel berpasangan digunakan untuk mengetahui tingkat keberdayaan petani sebelum dan setelah dibina oleh P4S di Kabupaten Lampung Timur yaitu. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian *pre-post* atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda. *Paired sample t-test* digunakan apabila data berdistribusi normal. Menurut Nuryadi dkk. (2017), *paired sample t-test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut.

1. Jika probabilitas ($\text{Asymp.Sig} \leq 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika probabilitas ($\text{Asymp.Sig} > 0.05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur dalam kategori sedang (40%) yang terdiri dari lima indikator peranan yaitu melakukan pelatihan dan mengembangkan serta diseminasi teknologi/inovasi dalam kategori sedang, melakukan penyuluhan, menumbuhkembangkan kader tani, dan mengembangkan jejaring kerjasama dalam kategori rendah.
2. Tingkat keberdayaan petani setelah mendapat binaan P4S di Kabupaten Lampung Timur dalam kategori cukup berdaya (40%). Berdasarkan tiga indikator tingkat keberdayaan petani yaitu kemampuan ekonomi, kemampuan dalam mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis dalam kategori rendah.
3. Sistem tata kelola lembaga, kerjasama dan kemitraan, dan peranan P4S berpengaruh langsung terhadap tingkat keberdayaan petani binaan P4S. Sistem tata kelola lembaga, kapasitas lembaga, dan manajemen lembaga berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat keberdayaan petani binaan melalui peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur.
4. Tingkat keberdayaan petani sebelum dan setelah dibina P4S di Kabupaten Lampung Timur berbeda signifikan dengan nilai Sig $0,00 < 0,05$. Setelah mendapat binaan P4S, jumlah petani yang berada dalam kategori mampu semakin bertambah berdasarkan tiga indikator yaitu kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan perlu dilakukan:

1. Peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat ditingkatkan dengan menambah frekuensi penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, menumbuhkembangkan kader tani melalui pertemuan rutin dan pelatihan kepemimpinan, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.
2. Pemerintah selaku pengambil kebijakan perlu memperhatikan keadaan di lapangan untuk meningkatkan pembinaan bagi Lembaga swadaya dan memperhatikan kebutuhan Lembaga swadaya seperti membantu menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang terselenggaranya pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Agbamu, J.U. 2000. Agricultural Research, Extension Linkage Systems: An International Perspective, Agricultural Research & Extension Network, Department for International Development, U.K., *Network Paper* No. 106, pp. 7.
- Alam, A.S., Rizal, A.N., dan Tresnawan, M.D. 2021. Peran Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya dalam Peningkatan Pegetahuan dan Keterampilan Peserta Pelatihan. *Jurnal Agrita*. 3(2):71-82.
- Ambarwati, K., Nurmayasari, I., dan Prayitno, R. T. 2020. Hubungan Karakteristik Petani dan Perilaku Komunikasi Petani dalam Pemenuhan Informasi Usahatani Lada di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 8(2): 280-286.
- Anantanyu, S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *SEPA*. 7(2): 102-109.
- Anderson, J. and Feder, G. 2004. Agricultural extension: Good intentions and hard realities. *World Bank Research Obsever*. 19: 41-60.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 2018. *Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompokani*. Kementerian Pertanian, Jakarta. 46 hlm.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Bahua, M.I. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian Dan Dampaknya Pada Perilaku Petani Jagung Di Provinsi Gorontalo. (Tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Bahua, M.I. 2015. *Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia*. Ideas Publishing, Gorontalo. 119 hlm.
- Biddle, B.J. 1986. Recent Developments In Role Theory. *Ann. Rev. Social*. 12: 67-92.
- Birner, R., Davis, K., Pender, J., Nkonya E., Anandajayasekeram, P., Ekboir, J., Mbabu, A., Spielman, D.J., Horna, D., Benin, S., and Cohen, M. 2009. From Best Practice to Best Fit: A Framework for Designing and Analyzing

- Pluralistic Agricultural Advisory Services Worldwide. *Journal of Agricultural Education and Extension*. 15(4): 341-355.
- Dajan, A. 1986. *Pengantar Metode Statistik II Jilid I*. LP3ES, Jakarta.
- Descartes, Harianto, A.F. Falatehan. 2021. Penyuluhan Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Usahatani di Gapoktan Rorotan Jaya, Rorotan, Cilincing, Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*. 5(2):390-403.
- Dewi, R. 2017. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Usaha Tani dan Keberhasilan Program Simantri di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 6(2): 701-728.
- ECDPM. 2006. *Institutional Development: Learning by Doing and Sharing*. European Centre for Development Policy Management (ECDPM) . Natherlands Ministri of Foreign Affairs. <http://www.ecdpm.org/>.
- Fadhilah, N. 2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Peranan Anggota P3A di Wilayah GP3A Sumber Tirta Dalam Pengelolaan IPAIR (Iuran Pelayanan Irigasi) Di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. (Tesis). Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Foe, J.A.K. dan Sunaryanto, L.T. 2020. Peranan Yayasan Swasta terhadap pemberdayaan Petani Desa di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 16(2): 185-198.
- Ghozali, I. dan L, Hengky. 2014. *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haryanto, Y., Sumardjo, Amanah, S., Tjitropranoto, P. 2017. Efektivitas Peran penyuluh Swadaya dalam Pemberdayaan petani di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*. 20(2): 141-154.
- Hidayah, N. 2019. Pengaruh Karakteristik Peternak terhadap Adopsi Teknologi Pemeliharaan pada Peternakan Kambing Peternakan Ettawa di Desa Hargotirto Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 19(1): 1-10.
- Ife, J. and Frank, T. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Edisi Ketiga (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid; alih bahasa). Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 717 hlm.
- Kassa, B. and Alemu, D. 2017. Agricultural Research and Extension Linkages: Challenges and Intervention Options. *Ethiop. Jurnal Agric. Sci*. 27(1):55-76.

- Kusumadinata, A.A., Sumardjo, Sadono, D, dan Burhanuddin. 2021. Pengaruh Sumber Informasi dan Dukungan Kelembagaan terhadap Kemandirian Petani di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penyuluhan*. 17(1): 72-84.
- Lantaeda, S.B., Lengkong, F.D.J., Ruru, J.M. 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*. 4(48): 1-9.
- Larasati, F.A., Qurniati, R., dan Herwanti, S. 2015. Peran Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dalam Membantu Masyarakat Mendapatkan Izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 20(1): 9-17.
- Lubis, R.K. 2015. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai. (Tesis). Universitas Sumatera Utara. Medan. 70 hlm.
- Mappasere, F.A. 2014. Kemitraan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Karang Anyar Kota Makassar). (Tesis). Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Marius A.J., Sumardjo, Slamet M., Asngari P.S. 2007. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Penyuluh terhadap Kompetensi Penyuluh di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penyuluhan*. 3(2): 8-19.
- Maslow, A. 1956. Maslow's Hierarchy of Needs Motivational Model.
- Mekannon, H., Tolossab, D., Kassac, B., and Girmad, A. 2020. Understanding Factor Affecting the Performance of Agricultural Extension System in Ethiopia. *Ethiop. Jurnal Agric. Sci*. 30(4): 237-263.
- MoANR. 2017. *Ethiopia's Agricultural Extension Strategy: Vision, Systemic Bottleneck and Priority Intervention*. Ministry of Agriculture and Natural Resources, Addis Ababa, Ethiopia.
- Muhson, A. 2022. *Analisis Statistik dengan SmartPLS: Path Analysis, Confirmatory Factor Analysis, & Structural Equation Modeling*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Hlm 1-31.
- Munyua, C.N., Adams, P.F. and Thomson, J.S. 2002. Designing Effective Linkages for Sustainable Agricultural Extension Information Systems Among Developing Countries in Sub-Saharan Africa. *Proceedings of the 18th Annual Conference of the Association for International Agricultural and Extension Education*, South Africa, pp. 301- 307
- Mursaluhuddin, T., Melisami, dan Vermila, C.W.M. 2019. Manajemen Kinerja Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Agri Sains*.3(1).

- Mutmainah, R., dan Sumardjo, 2014. Peran Pemimpin Kelompok Tani dan Efektivitas Pemberdayaan Petani. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- NAO. 2008. *Penggunaan Sanksi dan Penghargaan di Sektor Publik: Praktik Pengukuran Kinerja*. Kantor Audit Nasional, Inggris.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 597 hlm.
- Nuryadi, Astuti, T.D., Utami, E.S., dan Budiantara, M. 2017. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Sibuku Media, Yogyakarta. 170 hlm.
- OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 2003. *Good Corporate Governance*. Corporate Affairs Division Directorate for Financial and Enterprise Affairs OECD 2, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 FRANCE www.oecd.org/daf/corporateaffairs
daf.contact@oecd.org.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 51/Permentan/OT.140/12/2009. *Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 33 tahun 2016. *Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya*.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016. *Pembinaan Kelembagaan Petani*. Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. *Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Pradnyawati, I.G.A.B. dan Cipta, W. 2021. Pengaruh Luas Lahan, Modal, dan Jumlah Produksi terhadap Pendapatan Petani Sayur di kecamatan Baturiti. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 9(2): 93-100.
- Pramana, D., dan Rafinda, M.S. 2022. Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian. *AGRILAND Jurnal Ilmu Pertanian*. 10(2): 171-177.
- Priyono. 2007. *Pengantar Manajemen*. Zifataman Publisher, Surabaya. 129 hlm.
- Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. 2022. *P4S Per Provinsi*. http://p4s.bppsdp.pertanian.go.id/table_provinsi.php. Diakses pada 2 Juli 2022.
- Qintamy, R.A., Harniati, Kusnadi, D. 2020. Tingkat Keberdayaan Petani dalam Penerapan Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA) pada Budidaya Ubi Jalar di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Agribisnis*. 5(4): 131-140.

- Ragasa, C., Ulimwengu, J., Randriamamonjy, J., and Badibanga, T. 2015. Factors Affecting Performance of Agricultural Extension: Evidence from Democratic Republic of Congo. *Jurnall of Agricultural Education and Extension*. 1–31.
- Rahmat, J. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Rosa Karya, Bandung.
- Refiswal. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Langkat. *Agrica Ekstensia*. 12(2):26-32.
- Rohman, A. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Inteligencia Media, Malang. 192 hlm.
- Sapar, Jahi, A., Ansgari, P. S., Saleh, A. dan Purnaba, I.G.P. 2011. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Kompetensi Petani Kakao di Empat Wilayah Sulawesi Selatan. *Forum Pascasarjana*. 34(4): 297-305.
- Sarwono, J. 2011. Mengenal Path Analysis: Sejarah, Pengertian, dan Aplikasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*. 11(2): 285-296.
- Sarwono, J. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Suluh Media, Yogyakarta. 274 hlm.
- Setiawan, I., Djudawinata, M.G., dan Nugraha, A. 2016. Peran Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) dalam Pengembangan Pemuda Pedesaan (Studi Kasus di P4S Tani Mandiri Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*. 1(2): 95-204.
- Solihin, Setiawan, I., dan Wulandari, E. 2019. Kinerja Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya Berbasis Pesantren di Jawa Barat. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. 5(2): 304-315.
- Suharto, E. 2021. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Startegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama, Bandung. 274 hlm.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media, Yogyakarta.
- Susanti, D., Listiana, N.H., dan Widayat, T. 2016. Pengaruh Umur Petani, Tingkat Pendidikan, dan Luas Lahan terhadap hasil Produksi Tanaman Sembung. *Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia*. 9(2): 75-82.
- Susetiawan, D.R. 2004. *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syafruddin, Hariadi, S.S., dan Wastutiningsih, S.P. 2013. Kinerja Penyuluh Pertanian Berdasarkan Faktor Personal dan Situasional. *Jurnal Psikologi*. 40(2): 240 – 257.

- Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.
- Voley, B. 2002. *Sustaining Agriculture: Policy, Governance, and the Future of Family-based Farming*. Sustainable Agriculture & Rural Livelihoods Programme International Institute for Environment and Development 3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD, UK, pp.189.
- Wibowo, E. 2010. Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. 10(2): 129 – 138.
- Widiastuti, S.N., Suryana, Y., Prabowo, A. Evaluasi Perubahan Pengetahuan dan Keterampilan Petani dalam Pembuatan Kompos Jerami Padi di Kelompok Karya Bersama Pampangan Kab. Ogan Komering Ilir. *Jurnal Triton*. 9(1): 51-58.
- Yeni, R., Nikmatullah, D., dan Prayitno, R.T. 2019. Peranan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) dalam Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 7(4): 552-559.
- Yusup, F. 2018. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*. 7(1): 17-23.